

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas Rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 selesai disusun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016– 2021 yang dilaksanakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik.

Penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kab.Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tatakerja Setda Kabupaten Pemalang. Penyusunan dan kebijakan anggaran merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5(lima) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Maka dari itu, kami mengharapkan dari semua pihak dapat memberikan masukan, baik saran maupun kritik yang bersifat membangun dalam rangka menuju perbaikan selanjutnya.

Dengan telah disusunnya Renstra ini, besar harapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mencapai target kinerja agar dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi penyelenggara program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang diharapkan akan mendorong pencapaian visi misi Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Ttd

Dis: BUDHI RAHARDJO, MM
Pembina Utama Madya
NIP.195906011988031007



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 38 /TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR : 188.4/254/TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 188.4/254/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
25. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 188.4/254/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 diubah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
- 2.2. Sumber Daya Manusia
- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah

- BAB. III ISU - ISU STRATEGIS
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Tengah
 - 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Isu – Isu Strategis
- BAB. IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
 - 4.2. Strategi Dan Kebijakan
- BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1. Program
 - 5.2. Kegiatan
 - 5.3. Indikator Kinerja
- BAB. VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB. VII PENUTUP

- KEDUA : Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Ttd

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590601 198803 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG... | 7 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Pemalang | 7 |
| 2.2. Sumber Daya Manusia | 20 |
| 2.3. Sarana dan Prasarana | 22 |
| 2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah | 37 |
| 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan | 56 |
| 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah | 58 |
| | |
| BAB. III ISU - ISU STRATEGIS | 59 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah | 59 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih | 62 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Tengah | 63 |
| 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis | 64 |
| 3.5 Isu – Isu Strategis | 67 |
| | |
| BAB. IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 68 |
| 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang | 68 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| | 4.2 Strategi Dan Kebijakan | 73 |
| BAB. V | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 84 |
| | 5.1. Program | 84 |
| | 5.2. Kegiatan | 84 |
| | 5.3. Indikator Kinerja | 120 |
| BAB. VI | INDIKATOR KINERJA YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 157 |
| BAB. VII | PENUTUP | 158 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----|------------|--|-----|
| 1. | Tabel 2.1 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon | 20 |
| 2. | Tabel 2.2 | Kondisi Kpegawaian berdasarkan pendidikan yang ditamatkan | 21 |
| 3. | Tabel 2.3 | Sarana dan Prasarana Bagian Tata Pemerintahan tahun 2016 | 22 |
| 4. | Tabel 2.4 | Sarana dan Prasarana Bagian Hukum tahun 2016 | 23 |
| 5. | Tabel 2.5 | Sarana dan Prasarana Bagian Humas tahun 2016 | 24 |
| 6. | Tabel 2.6 | Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2016 | 26 |
| 7. | Tabel 2.7 | Sarana dan Prasarana Bag. Perekonomian dan SDA tahun 2016.... | 28 |
| 8. | Tabel 2.8 | Sarana dan Prasarana Bagian Kesra tahun 2016 | 29 |
| 9. | Tabel 2.9 | Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi tahun 2016 | 30 |
| 10. | Tabel 2.10 | Sarana dan Prasarana Bagian Keuangan tahun 2016 | 31 |
| 11. | Tabel 2.11 | Sarana dan Prasarana Bagian Umum tahun 2016 | 32 |
| 12. | Tabel 2.12 | Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016 | 37 |
| 13. | Tabel 2.13 | Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 | 56 |
| 14. | Tabel 2.14 | Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2011 – 2016 | 56 |
| 15. | Tabel 2.15 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016 | 57 |
| 16. | Tabel 3.1 | Pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal | 61 |
| 17. | Tabel 4.1 | Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 | 69 |
| 18. | Tabel 4.2 | Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 | 70 |
| 19. | Tabel 4.3 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 | 71 |
| 20. | Tabel 4.4 | Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 | 74 |
| 21. | Tabel 5.1 | Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021 | 85 |
| 22. | Tabel 5.2 | Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 | 107 |
| 23. | Tabel 5.3 | Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 | 120 |
| 24. | Tabel 6.1 | Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021 | 157 |

DAFTAR GAMBAR

1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 201719

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 38 /2017
TANGGAL : 22 September 2017

RENCANA STRATEGIS (RENSRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD), yang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Pemalang, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pemalang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat dokumen lima tahunan berupa *Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2021*, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang akan dicapai.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun paling lambat 1 (bulan) setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan dan perlu mendapat pengesahan dari Kepala Daerah dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah, Rencana Strategis ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diembannya. Rencana Strategis memiliki peran yang sangat penting bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Rencana Strategis menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana - rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan “*Clean and Good Governance*” merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pematang, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi reformasi agar kesan masyarakat maupun kalangan swasta yang sering menilai birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban serta korup tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kemampuan pemerintah Kabupaten Pematang dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Pematang ke arah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang menjadi sangat penting sekaligus mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang. Penting karena dapat membantu dan menentukan arah masa depan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang mampu memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang yang disusun setiap tahun.

12 LANDASANHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
23. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

30. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.

13 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rencana Strategis mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah termasuk semua unsur didalamnya dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan harapan yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab yang diemban Perangkat Daerah.

Adapun penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang bertujuan untuk:

- a. Acuan resmi bagi Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiaptahunnya;
- b. Tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;
- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Tujuan tersebut didokumentasikan dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat berbagai konsep perencanaan yang komprehensif dan operasional sesuai dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat menjadi alternatif tindak lanjut pemecahan agenda pembangunan secara bertahap, terencana dan terarah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

14 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Pematang
- 2.2. Sumber Daya Manusia

- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah
- BAB III. ISU - ISU STRATEGIS**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih.
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.
 - 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Isu – isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBLIJAKAN.**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.
 - 4.2. Strategis dan Kebijakan.
- BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**
 - 5.1. Program
 - 5.2. Kegiatan
 - 5.3. Indikator Kinerja
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**
- BAB VII. PENUTUP.**

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

**21. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

2.1 Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

- a. Subbagian Pemerintahan Umum;
- b. Subbagian Otonomi Daerah;
- c. Subbagian Kerjasama.

2.2 Bagian Hukum membawahi :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi.

3. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari :

3.1 Bagian Pembangunan, membawahi :

- a. Subbagian Bina Program;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan;
- c. Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

3.2 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :

- a. Subbagian Perekonomian;
- b. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Subbagian Sumber Daya Alam.

3.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Subbagian Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Subbagian Kesejahteraan Sosial.

4. Asisten Administrasi terdiri dari :

4.1 Bagian Organisasi, terdiri dari;

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Analisis Jabatan;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan.

4.2 Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, terdiri dari :

- a. Subbagian Pelayanan Publik;
- b. Subbagian Reformasi Birokrasi;
- c. Subbagian Akuntabilitas.

- 4.3 Bagian Umum, terdiri dari;
- a. Subbagian Protokol dan Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Keuangan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan daerah berdasarkan visi dan misi daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Setda dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Menetapkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dokumen perencanaan daerah dan hasil analisa guna mencapai visi misi tersebut;

- e. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan program kegiatan guna mencapai visi misi daerah;
- f. Menetapkan inovasi daerah berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- h. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j. Menetapkan laporan Pemerintah Daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2. Asisten Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta kecamatan sesuai visi misi daerah yang ditetapkan, guna mencapai visi misi tersebut;
- b. Mengendalikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Hukum berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- c. Merumuskan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Hukum sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Hukum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemerintahan dan Hukum agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Merumuskan inovasi daerah Bidang Pemerintahan dan Hukum berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- f. Mengendalikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan dan Hukum sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Hukum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Merumuskan laporan di Bidang Pemerintahan dan Hukum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1 Bagian Tata Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2 Bagian Hukum

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi

berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3. Asisten Ekonomi Pembangunan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, pemuda, dan olahraga, tenaga kerja, perizinan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan

- umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan sesuai visi misi daerah yang ditetapkan, guna mencapai visi misi tersebut;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Setda dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Merumuskan kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - e. Merumuskan inovasi daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 - f. Mengendalikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
 - g. Mengendalikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setda sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
 - h. Mengarahkan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - j. Merumuskan laporan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3.1 Bagian Pembangunan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan Setda meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setda sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Layanan Pengadaan, Bina Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3.2 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam sesuai dengan program dan kegiatan Bagian Perekonomian, Badan Usaha Milik Daerah, dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Perekonomian, Badan Usaha Milik Daerah, dan Sumber Daya Alam agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, dan Subbagian Sumber Daya Alam berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Keagamaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4. Asisten Administrasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang keuangan, pendapatan, perpustakaan dan kearsipan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan , administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai visi misi daerah yang ditetapkan, guna mencapai visi misi tersebut;
- b. Mengendalikan penyusunan rencana program dan kegiatan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- c. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Setda sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- d. Merumuskan kebijakan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum sesuai dengan program dan kegiatan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Mengendalikan penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi,

- dan Umum agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. Merumuskan inovasi daerah Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. Mengendalikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
 - h. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum dan Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - j. Merumuskan laporan di Bagian Organisasi, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan Umum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4.1 Bagian Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan sesuai dengan rencana program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Kelembagaan, Analisis Jabatan, dan Ketatalaksanaan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4.2 Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas sesuai dengan program dan kegiatan Bagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- f. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4.3 Bagian Umum

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

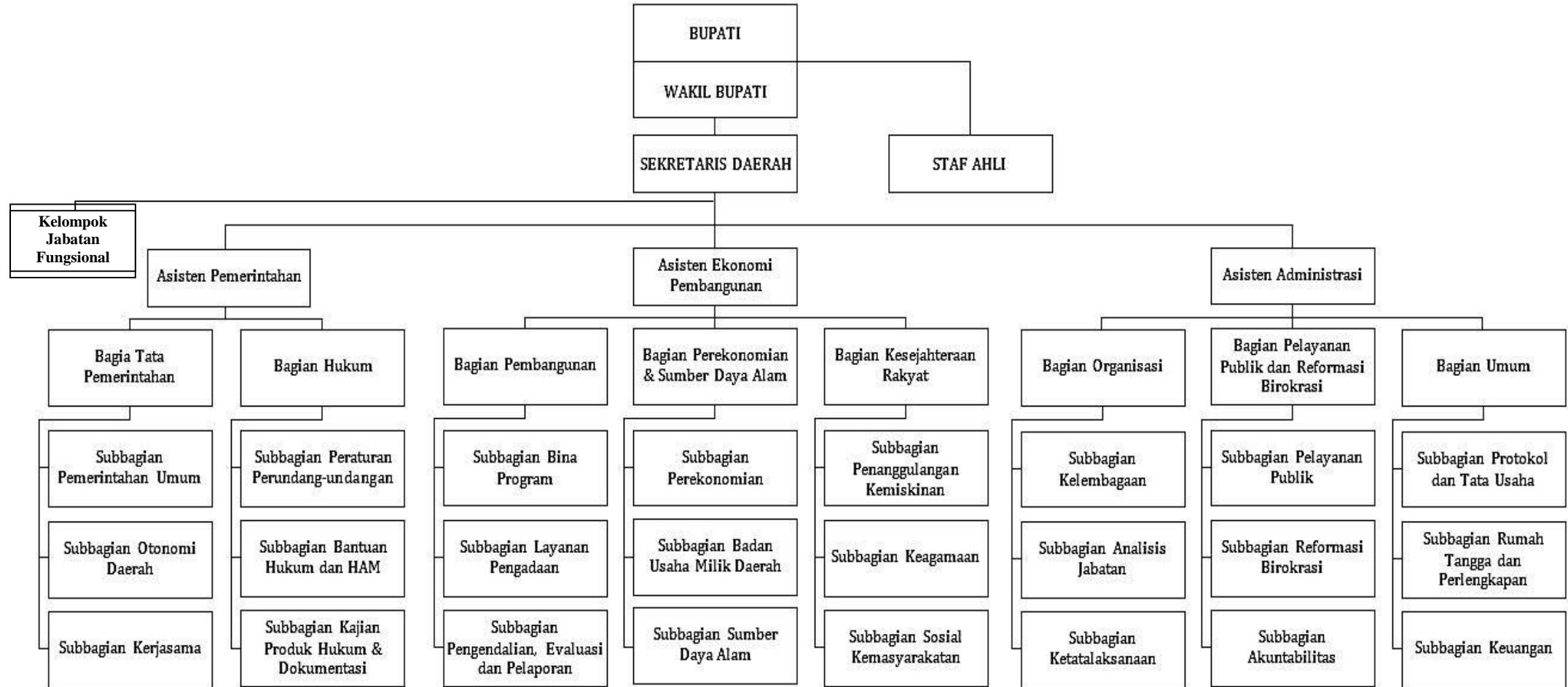
- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah

Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan berdasarkan dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- b. Menyusun rancangan kebijakan Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Setda sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e. Mengoordinasikan pengelolaan Administrasi Umum dan Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun rancangan inovasi daerah Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. Menyusun rancangan laporan di Subbagian Protokol dan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kab. Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pematang dan Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kab. Pematang serta Peraturan Bupati Pematang nomor 74 Tahun 2016 tentang uraian tugas jabatan struktural sekretariat daerah Kab. Pematang maka terjadi perubahan susunan organisasi perangkat daerah dan pegawai secara keseluruhan.

Dengan adanya perubahan tersebut maka jumlah pegawai dilingkungan Setda yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mengalami perubahan mulai pada bulan Januari 2017 memiliki pegawai sebanyak 192 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 14,58% (28 orang) berada pada Asisten Pemerintahan, 23,44% (45 orang) di Asisten Ekonomi Pembangunan serta 59,90% (115 orang) berada di Asisten Administrasi.

Selain itu dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan integritas dalam proses pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah maka seluruh fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 10 orang tenaga fungsional berada pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pematang. Hal ini dimaksudkan agar proses pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh POKJA ULP sebagai tenaga fungsional bisa berjalan secara independen, bebas dari pengaruh kepentingan tertentu serta fokus terhadap pekerjaan dan tidak di bebani pekerjaan yang tidak terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun jumlah pegawai dengan eselon II sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi serta 3 (tiga) orang Staf Ahli Bupati. Sedangkan untuk eselon III sebanyak 8 (delapan) orang dan eselon IV sebanyak 24 (dua puluh tujuh) orang.

Rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Sekretariat
Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017

| No | Uraian | Eselon | | | | Staf | Fungsional | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|----|-----|----|------|------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Staf Ahli | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Asisten | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Bagian Tata Pemerintahan | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 9 |
| 5 | Bagian Hukum | - | - | 1 | 3 | 14 | - | 18 |

| No | Uraian | Eselon | | | | Staf | Fungsional | Jumlah |
|----|--------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | I | II | III | IV | | | |
| 6 | Bagian Perkonomian | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 10 |
| 7 | Bagian Pembangunan | - | - | 1 | 3 | 10 | 10 | 24 |
| 8 | Bagian Kesra | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 10 |
| 9 | Bagian Organisasi | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 7 |
| 10 | Bagian PPRB | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 11 |
| 11 | Bagian Umum | - | - | 1 | 3 | 92 | - | 96 |
| | Jumlah | 0 | 7 | 8 | 24 | 143 | 10 | 192 |

Tabel 2.2

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pematang
Tahun 2017**

| No | Uraian | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|----|---------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1 | Lingkup Sekretaris Daerah | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Lingkup Staf Ahli | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Lingkup Asisten | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Bagian Tata Pemerintahan | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 9 |
| 5 | Bagian Hukum | - | 1 | 13 | 1 | 3 | - | - | 18 |
| 6 | Bagian Perkonomian | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 7 | Bagian Pembangunan | - | 8 | 12 | 1 | 3 | - | - | 24 |
| 8 | Bagian Kesra | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 10 |
| 9 | Bagian Organisasi | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| 10 | Bagian PPRB | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 11 |
| 11 | Bagian Umum | - | 1 | 20 | 3 | 50 | 15 | 7 | 96 |
| | Jumlah | 1 | 25 | 68 | 9 | 67 | 15 | 7 | 192 |

Dari segi pendidikan, yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, S1 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, D3 sebanyak 9 (sembilan) orang, SLTA sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, SLTP sebanyak 15 (lima belas) orang dan SD sebanyak 7 (tujuh) orang.

23. SARANA DAN PRASARANA.

Guna mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang, pada tahun 2016 dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 2.3

**SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN
2016**

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|-----------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 12 |
| 1 | - Station Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 11 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 78 |
| 1 | - Lemari Besi | 1 |
| 2 | - Filling Besi/Metal | 12 |
| 3 | - Lemari Kaca | 5 |
| 4 | - Overhead Projektor | 1 |
| 5 | - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 16 |
| 6 | - Lemari Kayu | 1 |
| 7 | - Meja Rapat | 1 |
| 8 | - Kursi Tamu | 1 |
| 9 | - AC Split | 4 |
| 10 | - Televisi | 2 |
| 11 | - Wireless | 1 |
| 12 | - Camera Video | 1 |
| 13 | - Alat Pemadam Portable | 2 |
| 14 | - Lap Top | 2 |
| 15 | - Note Book | 4 |
| 16 | - Hard Disk | 2 |
| 17 | - Scanner | 1 |
| 18 | - Printer | 9 |
| 19 | - Modem | 1 |
| 20 | - Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 10 |
| 21 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 2 |
| 1 | - Handy Talky | 2 |
| | Total | 92 |

b. Bagian Hukum.

Tabel 2.4
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUKUM TAHUN
2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|------------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 7 |
| 1 | - Station Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 6 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 139 |
| 1 | - Lemari Besi | 2 |
| 2 | - Rak Besi/Metal | 4 |
| 3 | - Filling Besi/Metal | 5 |
| 4 | - Lemari Kaca | 1 |
| 5 | - Alat Penghancur Kertas | 2 |
| 6 | - White Board | 1 |
| 7 | - Overhead Projektor | 1 |
| 8 | - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 1 |
| 9 | - Meja Kayu/Rotan | 8 |
| 10 | - Meja Rapat | 2 |
| 11 | - Meja Tulis | 2 |
| 12 | - Kursi Rapat | 2 |
| 13 | - Kursi Tamu | 2 |
| 14 | - Meja Komputer | 4 |
| 15 | - AC Unit | 7 |
| 16 | - Kipas Angin | 1 |
| 17 | - Exhaust Fan | 2 |
| 18 | - Unit Power Supply | 2 |
| 19 | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 |
| 20 | - P.C Unit | 22 |
| 21 | - Lap Top | 12 |
| 22 | - Note Book | 2 |
| 23 | - CPU | 3 |
| 24 | - Printer | 14 |
| 25 | - Scanner | 1 |
| 26 | - Printer | 3 |
| 27 | - Scanner | 1 |
| 28 | - Router | 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|------------|
| 29 | - Hub | 1 |
| 30 | - Peralatan Jaringan Lain-lain | 2 |
| 31 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 3 |
| 32 | - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 3 |
| 33 | - Lemari Buku untuk Perpustakaan | 12 |
| 34 | - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 5 |
| 35 | - Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain | 3 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 11 |
| 1 | - Proyektor + Attachment | 1 |
| 2 | - Unintemuptible Power Supply (UPS) | 2 |
| 3 | - Audio Cassete Recorder | 1 |
| 4 | - Camera Electronic | 4 |
| 5 | - Video Tape Recorder Portable | 1 |
| 6 | - Layar Film | 1 |
| 7 | - Facsimile | 1 |
| | Total | 157 |

c. Bagian Humas

Tabel 2.5
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN HUMAS TAHUN
2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|-----------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 11 |
| 1 | - Station Wagon | 2 |
| 2 | - Sepeda Motor | 9 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 97 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Longewagen (18) | 1 |
| 2 | - Lemari Besi | 1 |
| 3 | - Rak Besi/Metal | 1 |
| 4 | - Filling Besi/Metal | 6 |
| 5 | - Lemari Kaca | 2 |
| 6 | - Lemari kayu | 4 |
| 7 | - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 1 |
| 8 | - Meja Kayu/Rotan | 1 |
| 9 | - Zice | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|-----------|
| 10 | - Meja Reseption | 1 |
| 11 | - Kursi Putar | 1 |
| 12 | - Meja Biro | 3 |
| 13 | - Sofa | 2 |
| 14 | - Lemari Es | 1 |
| 15 | - AC Unit | 8 |
| 16 | - AC Split | 2 |
| 17 | - Kipas Angin | 1 |
| 18 | - Televisi | 2 |
| 19 | - Loudspeaker | 1 |
| 20 | - Sound System | 1 |
| 21 | - Microphone | 2 |
| 22 | - Step Up/Down | 1 |
| 23 | - Camera Video | 3 |
| 24 | - Camera Film | 1 |
| 25 | - Tustel | 5 |
| 26 | - Dispenser | 2 |
| 27 | - Handy Cam | 1 |
| 28 | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 4 |
| 29 | - P.C Unit | 9 |
| 30 | - Lap Top | 3 |
| 31 | - Note Book | 2 |
| 32 | - Hard Disk | 6 |
| 33 | - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | 2 |
| 34 | - Printer | 3 |
| 35 | - Scanner | 1 |
| 36 | - Monitor | 2 |
| 37 | - Printer | 9 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 71 |
| 1 | - Camera + Attachment | 11 |
| 2 | - Audio Amplifier | 1 |
| 3 | - Compact Disc. Player | 2 |
| 4 | - Disc. Record Player | 5 |
| 5 | - Headphone | 2 |
| 6 | - Microphone/Wireless Mic | 2 |
| 7 | - Battery Charger | 3 |
| 8 | - Enconder/Decoder | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|---|------------|
| 9 | - Audio Cassete Recorder | 2 |
| 10 | - Digital Audio Tape Recorder | 1 |
| 11 | - Peralatan studio Visual Lain-lain | 1 |
| 12 | - Camera Electronic | 2 |
| 13 | - Video Switcher | 1 |
| 14 | - Tripod Camera | 4 |
| 15 | - Lighting Stand Tripod | 1 |
| 16 | - Film Projector | 2 |
| 17 | - Camera Film | 3 |
| 18 | - Lensa Kamera | 2 |
| 19 | - Mixer PVC | 1 |
| 20 | - Layar Film | 1 |
| 21 | - Lighting Head Body | 4 |
| 22 | - Camera Vertikal | 1 |
| 23 | - Megaphone | 2 |
| 24 | - Handy Talky | 4 |
| 25 | - Handphone | 7 |
| 26 | - Unit Transceiver Stationary | 2 |
| 27 | - Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain | 1 |
| 28 | - Unit Transceiver UHF Portable | 1 |
| 29 | - Unit Pemancar VHF/FM Stationary | 1 |
| | Total | 179 |

d. Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 2.6

SARANA DAN PRSARANA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|-----------|
| I | a. Alat-alat Besar | 1 |
| 1 | - Transportable Electric Generating Set | 1 |
| II | b. Alat-alat Angkutan | 7 |
| 1 | - Station Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 6 |
| III | c. Alat Bengkel dan Alat Ukur | 10 |
| 1 | - Peralatan Las Listrik | 3 |
| 2 | - Water Pas | 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|------------|
| 3 | - ALat Ukur Universal Lain-lain | 2 |
| 4 | - ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 3 |
| IV | d. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 115 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 |
| 2 | - Lemari Besi | 7 |
| 3 | - Rak Besi/Metal | 1 |
| 4 | - Filling Besi/Metal | 8 |
| 5 | - Alat Penghancur Kertas | 1 |
| 6 | - White Board | 1 |
| 7 | - Kursi Besi/Metal | 1 |
| 8 | - Zice | 1 |
| 9 | - Meja Rapat | 1 |
| 10 | - Meja Reseption | 1 |
| 11 | - Kursi Tamu | 2 |
| 12 | - Kursi Putar | 1 |
| 13 | - Meja Komputer | 8 |
| 14 | - Meja Biro | 2 |
| 15 | - AC Unit | 6 |
| 16 | - Tustel | 1 |
| 17 | - Handy Cam | 2 |
| 18 | - Local Area Network (LAN) | 1 |
| 19 | - P.C Unit | 8 |
| 20 | - Lap Top | 5 |
| 21 | - Note Book | 11 |
| 22 | - Personal Komputer Lain-lain | 4 |
| 23 | - Hard Disk | 2 |
| 24 | - Scanner | 1 |
| 25 | - Monitor | 2 |
| 26 | - Printer | 5 |
| 27 | - Scanner | 1 |
| 28 | - Server | 3 |
| 29 | - Hub | 1 |
| 30 | - Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 |
| 31 | - Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| 32 | - Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 3 |
| 33 | - Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 15 |
| 34 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 |
| 35 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 |
| 36 | - Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III | 1 |
| 37 | - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----------|---|------------|
| V | e. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 9 |
| 1 | - Unintemuptible Power Supply (UPS) | 1 |
| 2 | - Camera Electronic | 4 |
| 3 | - Video Tape Recorder Stationer | 1 |
| 4 | - Film Projector | 2 |
| 5 | - Pesawat Telephone | 1 |
| | T o t a l | 142 |

e. Bagian Perekonomian

Tabel 2.7
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN
2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|-----------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 11 |
| 1 | - Station Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 10 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 61 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 |
| 2 | - Filling Besi/Metal | 7 |
| 3 | - Lemari kayu | 2 |
| 4 | - Alat Penghancur Kertas | 1 |
| 5 | - Meja Rapat | 1 |
| 6 | - Meja Tulis | 1 |
| 7 | - Meja Komputer | 3 |
| 8 | - AC Unit | 5 |
| 9 | - Tabung Gas | 1 |
| 10 | - Televisi | 2 |
| 11 | - Wireless | 1 |
| 12 | - Stabilisator | 1 |
| 13 | - Handy Cam | 1 |
| 14 | - Lap Top | 13 |
| 15 | - Personal Komputer Lain-lain | 5 |
| 16 | - Printer | 3 |
| 17 | - Printer | 11 |
| 18 | - Scanner | 1 |
| 19 | - Digitzer | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|-----------|
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 8 |
| 1 | - Proyektor + Attachment | 2 |
| 2 | - Camera Film | 4 |
| 3 | - Handy Talky | 1 |
| 4 | - Peralatan Antena SHF/Parabola | 1 |
| | T o t a l | 80 |

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2.8
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|-----------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 6 |
| 1 | - Station Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 5 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 54 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 |
| 2 | - Filling Besi/Metal | 3 |
| 3 | - Lemari Kayu | 3 |
| 4 | - Meja Rapat | 1 |
| 5 | - Kursi Putar | 2 |
| 6 | - Meja Biro | 1 |
| 7 | - Sofa | 1 |
| 8 | - AC Unit | 3 |
| 9 | - Handy Cam | 1 |
| 10 | - Personal Komputer Lain-lain | 2 |
| 11 | - P.C Unit | 2 |
| 12 | - Lap Top | 6 |
| 13 | - Personal Komputer Lain-lain | 2 |
| 14 | - Printer | 3 |
| 15 | - Monitor | 1 |
| 16 | - Printer | 7 |
| 17 | - Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| 18 | - Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 14 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 5 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1 | - Camera + Attachment | 1 |
| 2 | - Proyektor + Attachment | 1 |
| 3 | - Unintemuptible Power Supply (UPS) | 3 |
| | T o t a l | 65 |

g. Bagian Organisasi

Tabel 2.9
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|-----------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 6 |
| 1 | - Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 5 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 85 |
| 1 | - Lemari Besi | 1 |
| 2 | - Lemari kayu | 5 |
| 3 | - Alat Penghancur Kertas | 1 |
| 4 | - Mesin Absensi | 5 |
| 5 | - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 8 |
| 6 | - Meja Rapat | 1 |
| 7 | - Kursi Rapat | 8 |
| 8 | - Moubiler Lainnya | 1 |
| 9 | - AC Unit | 5 |
| 10 | - Televisi | 4 |
| 11 | - Wireless | 2 |
| 12 | - Unit Power Supply | 1 |
| 13 | - Camera Film | 1 |
| 14 | - Handy Cam | 1 |
| 15 | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 |
| 16 | - Mainframe | 1 |
| 17 | - Internet | 2 |
| 18 | - Lap Top | 10 |
| 19 | - Personal Komputer Lain-lain | 2 |
| 20 | - CPU | 1 |
| 21 | - Hard Disk | 1 |
| 22 | - Printer | 7 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|------------|
| 23 | - CPU | 2 |
| 24 | - Monitor | 2 |
| 25 | - Printer | 3 |
| 26 | - Scanner | 2 |
| 27 | - Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 4 |
| 28 | - Server | 1 |
| 29 | - Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 |
| 30 | - Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III | 1 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 39 |
| 1 | - Proyektor + Attachment | 1 |
| 2 | - Unintemuptible Power Supply (UPS) | 1 |
| 3 | - Camera Electronic | 1 |
| 4 | - Peralatan Cetak Lain-lain | 1 |
| 5 | - Pesawat Telephone | 1 |
| 6 | - Alat Komunikasi Lain-lain | 4 |
| 7 | - Alat Komunikasi Sosial Lain-lain | 30 |
| | T o t a l | 130 |

h. Bagian Keuangan

Tabel 2.10
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN KEUANGAN TAHUN
2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|--|------------|
| I | a. Alat-alat Angkutan | 6 |
| 1 | - Staion Wagon | 1 |
| 2 | - Sepeda Motor | 5 |
| II | b. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 126 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | 1 |
| 2 | - Mesin Penghitung Uang | 1 |
| 3 | - Lemari Besi | 3 |
| 4 | - Rak Besi/Metal | 4 |
| 5 | - Rak Kayu | 3 |
| 6 | - Filling Besi/Metal | 7 |
| 7 | - Lemari Kayu | 1 |
| 8 | - Kursi Tamu | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|---|------------|
| 9 | - Kursi Putar | 11 |
| 10 | - Kursi Lipat | 7 |
| 11 | - Meja Komputer | 9 |
| 12 | - Meja Biro | 17 |
| 13 | - Mesin Penghisap Debu | 1 |
| 14 | - Lemari Es | 1 |
| 15 | - AC Unit | 5 |
| 16 | - Kipas Angin | 1 |
| 17 | - Televisi | 1 |
| 18 | - Handy Cam | 1 |
| 19 | - P.C Unit | 8 |
| 20 | - Lap Top | 12 |
| 21 | - Note Book | 2 |
| 22 | - Hard Disk | 3 |
| 23 | - Printer | 8 |
| 24 | - Scanner | 1 |
| 25 | - Monitor | 1 |
| 26 | - Hub | 1 |
| 27 | - Peralatan Jaringan Lain-lain | 1 |
| 28 | - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 14 |
| III | c. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1 |
| 1 | - Proyektor + Attachment | 1 |
| | T o t a l | 133 |

i. Bagian Umum

Tabel 2.11
SARANA DAN PRASARANA BAGIAN UMUM
TAHUN 2016

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----------|------------------------------|-----------|
| I | a. Alat-alat Besar | 7 |
| 1 | - Portable Generating Set | 2 |
| 2 | - Portable Water Pump | 1 |
| 3 | - Sumersible Pump | 4 |
| II | b. Alat-alat Angkutan | 77 |
| 1 | - Sedan | 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|--|------------|
| 2 | - Staion Wagon | 20 |
| 3 | - Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 1 |
| 4 | - Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 4 |
| 5 | - Sepeda Motor | 44 |
| 6 | - Sepeda | 6 |
| III | c. Alat Bengkel dan Alat Ukur | 5 |
| 1 | - Mesin Kompresor | 1 |
| 2 | - Mesin Gergaji | 1 |
| 3 | - Scanner | 3 |
| IV | d. Alat Kantor dan Rumah Tangga | 989 |
| 1 | - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | 2 |
| 2 | - Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 |
| 3 | - Mesin Ketik Elektronik | 1 |
| 4 | - Mesin Foto Copy dgn Kertas doble Folio | 1 |
| 5 | - Lemari Besi | 2 |
| 6 | - Rak Besi/Metal | 4 |
| 7 | - Rak Kayu | 1 |
| 8 | - Filling Besi/Metal | 18 |
| 9 | - Band Kas | 2 |
| 10 | - Lemari Kaca | 3 |
| 11 | - Lemari kayu | 7 |
| 12 | - Alat Penghancur Kertas | 3 |
| 13 | - White Board | 19 |
| 14 | - Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | 3 |
| 15 | - Papan Struktur | 6 |
| 16 | - Lemari Kayu | 21 |
| 17 | - Kursi Besi/Metal | 3 |
| 18 | - Kursi Kayu/Rotan/Bambu | 13 |
| 19 | - Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 19 |
| 20 | - Meja Rapat | 25 |
| 21 | - Meja Tulis | 43 |
| 22 | - Meja Makan | 15 |
| 23 | - Meja Podium | 2 |
| 24 | - Meja Reseption | 1 |
| 25 | - Meja Tambahan | 12 |
| 26 | - Meja Bundar | 1 |
| 27 | - Kursi Rapat | 60 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 28 | - Kursi Tamu | 17 |
| 29 | - Kursi Biasa | 19 |
| 30 | - Kursi Lipat | 5 |
| 31 | - Meja Komputer | 3 |
| 32 | - Kasur | 8 |
| 33 | - Meja Piket | 3 |
| 34 | - Tikar | 1 |
| 35 | - Meja Biro | 7 |
| 36 | - Sofa | 16 |
| 37 | - Lemari Pakaian | 22 |
| 38 | - Moubiler Lainnya | 9 |
| 39 | - Meja Tamu | 1 |
| 40 | - Moubiler Lainnya | 1 |
| 41 | - Jam Mekanis | 2 |
| 42 | - Mesin Penghisap Debu | 1 |
| 43 | - Mesin Potong Rumput | 1 |
| 44 | - Mesin Cuci | 6 |
| 45 | - Alat Pembersih Lain-lain | 1 |
| 46 | - Lemari Es | 10 |
| 47 | - AC Unit | 53 |
| 48 | - AC Split | 47 |
| 49 | - Kipas Angin | 17 |
| 50 | - Exhaust Fan | 8 |
| 51 | - Alat Pendingin Lain-lain | 2 |
| 52 | - Kompor Gas | 8 |
| 53 | - Oven Listrik | 3 |
| 54 | - Kitchen Set | 31 |
| 55 | - Alat Dapur Lain-lain | 1 |
| 56 | - Kitchen Set | 26 |
| 57 | - Tempat Sampah | 20 |
| 58 | - Alat Pemanas | 2 |
| 59 | - Televisi | 32 |
| 60 | - Cassette Recorder | 1 |
| 61 | - Amplifier | 4 |
| 62 | - Equalizer | 2 |
| 63 | - Loudspeaker | 22 |
| 64 | - Sound System | 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|-----|---|--------|
| 65 | - Karaoke | 2 |
| 66 | - Mic Conference | 12 |
| 67 | - Unit Power Supply | 6 |
| 68 | - Stabilisator | 1 |
| 69 | - Camera Video | 1 |
| 70 | - Camera Film | 12 |
| 71 | - Tustel | 2 |
| 72 | - Aquarium | 3 |
| 73 | - Kaca Hias | 2 |
| 74 | - Dispenser | 24 |
| 75 | - Gucci | 2 |
| 76 | - Handy Cam | 1 |
| 77 | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 37 |
| 78 | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 6 |
| 79 | - Personal Komputer Lain-lain | 2 |
| 80 | - P.C Unit | 17 |
| 81 | - Lap Top | 5 |
| 82 | - Note Book | 12 |
| 83 | - Personal Komputer Lain-lain | 6 |
| 84 | - Hard Disk | 1 |
| 85 | - Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | 1 |
| 86 | - Printer | 29 |
| 87 | - Scanner | 1 |
| 88 | - Monitor | 6 |
| 89 | - Printer | 2 |
| 90 | - Peralatan Personal Komputer Lain-lain | 5 |
| 91 | - Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati / Walikota | 1 |
| 92 | - Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/ Bupati/Walikota | 1 |
| 93 | - Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| 94 | - Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| 95 | - Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 15 |
| 96 | - Meja Kerja Pejabat Lain-lain | 5 |
| 97 | - Meja Tamu Ruangan Biasa | 2 |
| 98 | - Meja Rapat Pejabat Lain-lain | 1 |
| 99 | - Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/ Bupati/Walikota | 1 |
| 100 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 11 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|------------|--|--------------|
| 101 | - Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 |
| 102 | - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 3 |
| 103 | - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 10 |
| 104 | - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| 105 | - Kursi Tamu di Ruangan Menteri/ Gubernur/Bupati/Wali | 1 |
| 106 | - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 14 |
| 107 | - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain | 2 |
| 108 | - Lemari Buku untuk Perpustakaan | 5 |
| 109 | - Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 9 |
| 110 | - Buffet Kayu | 2 |
| V | e. Alat Studio dan Alat Komunikasi | 107 |
| 1 | - Camera + Attachment | 2 |
| 2 | - Proyektor + Attachment | 1 |
| 3 | - Microphone/Wireless Mic | 14 |
| 4 | - Unintemuptible Power Supply (UPS) | 11 |
| 5 | - Enconder/Decoder | 2 |
| 6 | - Peralatan studio Visual Lain-lain | 25 |
| 7 | - Camera Electronic | 5 |
| 8 | - Loudspeaker | 1 |
| 9 | - Telephone (PABX) | 3 |
| 10 | - Pesawat Telephone | 27 |
| 11 | - Telephone Mobile | 1 |
| 12 | - Facsimile | 5 |
| 13 | - Handphone | 3 |
| 14 | - Alat Komunikasi Lain-lain | 2 |
| 15 | - Unit Transceiver VHF Portable | 5 |
| VI | f. Alat - alat Kedokteran | 1 |
| 1 | - Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain | 1 |
| VII | g. Alat Laboratorium | 3 |
| 1 | - Personal Komputer | 3 |
| | Total | 1.189 |

24. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun 2016-2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang menurut indikator kinerja pelayanan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada periode Tahun 2011 s/d 2016 sebagaimana tabel 2.12. dibawah ini:

Tabel 2.12

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 – 2016

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan | 30.000 | 20.000 | - | - | - | - | 21.190 | 13.720 | - | - | - | - | 70,63 | 68,60 | - | - | - | - |
| 2 | Fasilitasi Pembukuan Nama Rupa Bumi | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 114.000 | - | 11.747 | 28.009 | 22.793 | 29.126 | 104.891 | - | 39,16 | 93,36 | 75,98 | 97,09 | 92,01 |
| 3 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | 200.000 | 185.000 | 176.526 | 129.203 | 226.882 | 205.000 | 199.969 | 175.390 | 176.315 | 121.914 | 168.547 | 151.925 | 99,98 | 94,81 | 99,88 | 94,36 | 74,29 | 74,11 |
| 4 | Pengadaan Tanah Operasional Pemerintah Desa | 415.000 | 5.250 | 44.000 | - | - | - | 342.896 | 3.862 | 42.861 | - | - | - | 82,63 | 73,56 | 97,41 | - | - | - |
| 5 | Penyusunan Materi Sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 10.000 | 48.000 | 56.000 | 52.000 | 38.000 | 49.000 | 9.994 | 48.000 | 54.598 | 46.525 | 37.300 | 47.558 | 99,94 | 100,00 | 97,50 | 89,47 | 98,16 | 97,06 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah | 21.000 | 426.000 | 460.031 | 458.798 | 480.000 | 355.000 | 20.818 | 397.585 | 425.494 | 439.962 | 451.820 | 193.569 | 99,13 | 93,33 | 92,49 | 95,89 | 94,13 | 54,53 |
| 7 | Koordinasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan | 30.000 | 95.000 | 125.000 | 145.000 | 140.000 | 172.500 | 27.278 | 64.959 | 122.962 | 138.732 | 134.793 | 170.320 | 90,93 | 68,38 | 98,37 | 95,68 | 96,28 | 98,74 |
| 8 | Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa | 126.000 | 1.523.161 | 530.000 | 425.000 | 500.000 | 850.000 | 104.696 | 1.335.813 | 516.903 | 410.580 | 414.943 | 800.157 | 83,09 | 87,70 | 97,53 | 96,61 | 82,99 | 94,14 |
| 9 | Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan. | 25.000 | 75.000 | 48.000 | - | 75.000 | - | 17.127 | 55.714 | 43.055 | - | 60.390 | - | 68,51 | 74,29 | 89,70 | - | 80,52 | - |
| 10 | Fasilitasi Pengadaan Tanah Kas Desa | 20.000 | 35.000 | 44.000 | - | - | - | 19.992 | 30.965 | 42.861 | - | - | - | 99,96 | 88,47 | 97,41 | - | - | - |
| 11 | Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. | - | 200.000 | 150.000 | 260.000 | 80.000 | 95.000 | - | 147.223 | 149.011 | 252.813 | 76.448 | 83.716 | - | 73,61 | 99,34 | 97,24 | 95,56 | 88,12 |
| 12 | Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 25.000 | - | 46.750 | - | - | - | 21.130 | - | 23.455 | - | - | - | 84,52 | - | 50,17 | - | - | - |
| 13 | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Pertanahan | - | 330.000 | 46.750 | 40.000 | 576.000 | 590.000 | - | 36.718 | 23.455 | 33.979 | 91.075 | 354.670 | - | 11,13 | 50,17 | 84,95 | 15,81 | 60,11 |
| 14 | Rapat Koodinasi di Bidang Pertanahan | - | 27.000 | 38.500 | 35.000 | 75.000 | 100.000 | - | 10.943 | 21.502 | 21.701 | 62.943 | 92.465 | - | 40,53 | 55,85 | 62,00 | 83,92 | 92,47 |
| 15 | Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa / Kelurahan | 83.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 100.000 | 77.662 | 48.515 | 68.125 | 67.031 | 38.744 | 94.663 | 93,57 | 97,03 | 97,32 | 95,76 | 96,86 | 94,66 |
| 16 | Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasayakatan | - | 551.000 | 566.756 | 554.000 | 580.990 | - | - | 535 | 540.945 | 545.366 | 571.000 | - | - | 0,10 | 95,45 | 98,44 | 98,28 | - |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Fasilitasi Penyusunan Regulasi di Tingkat Desa dan Kelurahan | 15.000 | 35.500 | 59.500 | 330.425 | 400.000 | 400.000 | 13.540 | 31.968 | 58.318 | 317.319 | 383.029 | 384.614 | 90,27 | 90,05 | 98,01 | 96,03 | 95,76 | 96,15 |
| 18 | Penyusunan Kelengkapan Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | - | 50.000 | 20.000 | - | - | - | - | 16.512 | 12.222 | - | - | - | - | 33,02 | 61,11 | - | - | - |
| 19 | Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan | - | - | 70.000 | - | - | - | - | - | 68.125 | - | - | - | - | - | 97,32 | - | - | - |
| 20 | Penyusunan Sitem Informasi terhadap Layanan Publik | 40.000 | - | - | - | - | - | 39.927 | - | - | - | - | - | 99,82 | - | - | - | - | - |
| 21 | Sistem Informasi Menejemen Pemerintahan Desa (SIMPEDES). | - | 37.000 | 54.500 | 68.000 | 60.000 | 45.000 | - | 34.750 | 53.952 | 65.910 | 56.971 | 43.819 | - | 93,92 | 98,99 | 96,93 | 94,95 | 97,38 |
| 22 | Penyusunan Buku Data Monografi Kecamatan. | - | 37.300 | 37.734 | 39.000 | 35.000 | 43.000 | - | 35.542 | 36.887 | 38.566 | 28.726 | 41.347 | - | 95,29 | 97,76 | 98,89 | 82,07 | 96,15 |
| 23 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah. | - | 30.000 | 48.100 | - | 50.000 | 75.000 | - | 13.556 | 38.439 | - | 45.314 | 61.197 | - | 45,19 | 79,91 | - | 90,63 | 81,60 |
| 24 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. | - | 165.000 | - | 300.000 | - | - | - | 163.004 | - | 286.571 | - | - | - | 98,79 | - | 95,52 | - | - |
| 25 | Pembinaan Administrasi pemerintah Kecamatan. | - | - | - | 50.000 | - | 110.000 | - | - | - | 45.288 | - | 103.534 | - | - | - | 90,58 | - | 94,12 |
| 26 | Persiapan Pembentukan pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan. | - | - | - | 80.000 | - | - | - | - | - | 73.811 | - | - | - | - | - | 92,26 | - | - |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Bagian Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembentukan unit Bantuan Hukum. | 83.947 | 101.050 | 153.568 | 228.449 | 108.530 | 171.449 | 44.007 | 73.856 | 95.290 | 148.539 | 82.721 | 116.182 | 52,42 | 73,09 | 62,05 | 65,02 | 76,22 | 67,76 |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang – undangan. | 35.000 | 86.000 | 61.075 | 59.246 | 50.000 | 52.500 | 30.908 | 82.359 | 60.650 | 58.946 | 49.079 | 51.945 | 88,31 | 95,77 | 99,30 | 99,49 | 98,16 | 98,94 |
| 3 | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan. | 209.500 | 250.000 | 258.925 | 238.800 | 300.324 | 396.665 | 171.788 | 163.331 | 240.987 | 215.780 | 266.652 | 355.205 | 82,00 | 65,33 | 93,07 | 90,36 | 88,79 | 89,55 |
| 4 | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan. | 91.000 | 337.400 | 449.546 | 491.739 | 499.726 | 389.147 | 88.128 | 288.802 | 416.823 | 451.192 | 480.649 | 322.970 | 96,84 | 85,60 | 92,72 | 91,75 | 96,18 | 82,99 |
| 5 | Publikasi peraturan Perundang – undangan. | 76.497 | 146.051 | 236.220 | 416.250 | 357.475 | 434.120 | 74.705 | 142.030 | 235.123 | 413.954 | 356.006 | 426.592 | 97,66 | 97,25 | 99,54 | 99,45 | 99,59 | 98,27 |
| 6 | Kajian peraturan Perundangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan Perundang - undangan Daerah. | 54.075 | 90.301 | 81.046 | 72.233 | 106.343 | 117.765 | 54.020 | 90.107 | 77.490 | 70.670 | 103.684 | 115.249 | 99,90 | 99,79 | 95,61 | 97,84 | 97,50 | 97,86 |
| 7 | Penyuluhan Peraturan Perundang - undangan | - | 33.000 | 30.365 | 41.094 | - | 120.420 | - | 30.224 | 30.275 | 40.602 | - | 63.528 | - | 91,59 | 99,70 | 98,80 | - | 52,76 |
| 8 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah | - | - | - | - | - | 170.420 | - | - | - | - | - | 161.092 | - | - | - | - | - | 94,53 |
| 9 | Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum | - | - | - | - | - | 138.158 | - | - | - | - | - | 105.047 | - | - | - | - | - | 76,03 |
| 10 | Fasilitasi Pemenuhan HAM | - | - | - | - | - | 72.377 | - | - | - | - | - | 48.081 | - | - | - | - | - | 66,43 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. Bagian Humas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Protokol Kepala Daerah | 71.313 | 89.900 | 97.500 | 99.600 | 149.150 | 201.000 | 70.167 | 89.129 | 85.978 | 98.095 | 147.788 | 197.782 | 98,39 | 99,14 | 88,18 | 98,49 | 99,09 | 98,40 |
| 2 | Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi | 27.200 | - | 51.800 | 38.000 | 35.400 | 50.000 | 26.637 | - | 47.850 | 28.886 | 30.517 | 47.532 | 97,93 | - | 92,37 | 76,02 | 86,21 | 95,06 |
| 3 | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | - | - | - | 191.200 | 140.600 | 270.500 | - | - | - | 18.756 | 134.300 | 261.100 | - | - | - | 9,81 | 95,52 | 96,52 |
| 4 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | 238.850 | 204.000 | 266.300 | 340.000 | 401.000 | 641.700 | 236.482 | 197.541 | 247.998 | 262.574 | 369.990 | 608.943 | 99,01 | 96,83 | 93,13 | 77,23 | 92,27 | 94,90 |
| 5 | Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 638.850 | 51.150 | 205.000 | 76.500 | 502.600 | 185.500 | 595.773 | 49.193 | 191.103 | 72.385 | 443.210 | 176.484 | 93,26 | 96,17 | 93,22 | 94,62 | 88,18 | 95,14 |
| 6 | Dokumentasi dan Publikasi Program / Kegiatan SKPD | - | 71.700 | 114.600 | 160.000 | 310.250 | 477.000 | - | 70.668 | 104.523 | 154.027 | 294.022 | 445.486 | - | 98,56 | 91,21 | 96,27 | 94,77 | 93,39 |
| 7 | Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif, Radio dan Televisi | - | - | 47.400 | 135.700 | 118.100 | 737.200 | - | - | 41.948 | 103.246 | 107.378 | 577.663 | - | - | 88,50 | 76,08 | 90,92 | 78,36 |
| 8 | Pengelolaan dan Inventerisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | 44.750 | 58.800 | 72.000 | 66.300 | 55.550 | 135.000 | 44.619 | 53.099 | 61.720 | 51.724 | 36.315 | 114.728 | 99,71 | 90,30 | 85,72 | 78,02 | 65,37 | 84,98 |
| 9 | Pengelolaan Program dan Radio, Televisi Daerah Untuk Masyarakat. | 51.147 | 36.500 | 43.300 | 79.400 | 99.150 | 200.000 | 46.480 | 34.020 | 23.994 | 63.961 | 74.738 | 160.649 | 90,88 | 93,21 | 55,41 | 80,56 | 75,38 | 80,32 |
| 10 | Asistensi / bimbingan Teknis Bidang Jurnalistik | - | - | - | 24.375 | - | 111.000 | - | - | - | 24.343 | - | 96.393 | - | - | - | 99,87 | - | 86,84 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Sosialisasi Kehumasan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - | - | - | 130.952 | - | - | - | - | - | 87,30 |
| 12 | Orientasi Keterbukaan Informasi | - | - | - | 53.200 | - | - | - | - | - | 37.572 | - | - | - | - | - | 70,62 | - | - |
| 13 | Pemberian Informasi Publik Melalui Iklan Layanan Masyarakat (adventorial) | - | - | - | 291.000 | 339.100 | 532.100 | - | - | - | 284.133 | 327.522 | 530.009 | - | - | - | 97,64 | 96,59 | 99,61 |
| 14 | Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah | - | - | - | 43.225 | - | 129.000 | - | - | - | 36.030 | - | 64.300 | - | - | - | 83,35 | - | 49,85 |
| IV. Bagian Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Mekanisme Penatausahaan Keuangan Sekertariat Daerah | 117.250 | 106.750 | 90.175 | 124.386 | 131.325 | 149.100 | 116.078 | 105.661 | 89.292 | 121.789 | 117.167 | 134.191 | 99,00 | 98,98 | 99,02 | 97,91 | 89,22 | 90,00 |
| 2 | Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Setda yang Mengikuti Pelatihan PP 54/2010 | 125.000 | - | 38.686 | 203.507 | 163.000 | 120.301 | 122.829 | - | 37.961 | 187.835 | 140.142 | 111.183 | 98,26 | - | 98,13 | 92,30 | 85,98 | 92,42 |
| 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Sekertariat Daerah Kab. Pemalang | 14.590 | 15.000 | 13.165 | 15.050 | 16.820 | 12.000 | 14.546 | 14.875 | 13.101 | 15.022 | 16.243 | 11.993 | 99,70 | 99,17 | 99,51 | 99,81 | 96,57 | 99,94 |
| 4 | Laporan Keuangan Akhir tahun 2010 dan Bahan Penyusunan Bahan - bahan lapora keuangan Akhir Tahun | 20.595 | 20.000 | 24.473 | 21.525 | 25.745 | 18.855 | 20.418 | 19.984 | 24.126 | 21.281 | 20.471 | 18.566 | 99,14 | 99,92 | 98,58 | 98,87 | 79,51 | 98,46 |
| 5 | Penyusunan Dokumen Penganggaran PD. | 73.945 | 87.250 | 87.525 | 111.059 | 98.840 | 159.224 | 73.618 | 84.567 | 85.625 | 100.679 | 85.478 | 144.190 | 99,56 | 96,92 | 97,83 | 90,65 | 86,48 | 90,56 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja dan Renstra) | 26.825 | 21.000 | 25.375 | 23.800 | 22.838 | - | 26.605 | 20.539 | 25.210 | 19.689 | 20.893 | - | 99,18 | 97,80 | 99,35 | 82,73 | 91,48 | - |
| 7 | Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip | - | - | - | 36.795 | 43.943 | 76.520 | - | - | - | 31.335 | 41.270 | 68.626 | - | - | - | 85,16 | 93,92 | 89,68 |
| V. Bagian Organisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja PD (bagian Organisasi) | 110.000 | 75.000 | 158.000 | 159.100 | 158.700 | 266.700 | 102.805 | 102.805 | 72.711 | 152.068 | 151.630 | 228.320 | 93,46 | 137,07 | 46,02 | 95,58 | 95,55 | 85,61 |
| 2 | Fasilitasi Pelayanan Tata Naskah secara Elektronik. | - | - | - | 327.100 | 150.400 | 341.300 | - | - | - | 322.996 | 98.236 | 332.796 | - | - | - | 98,75 | 65,32 | 97,51 |
| 3 | Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. | 43.000 | 25.000 | 44.500 | 26.800 | 17.000 | - | 39.967 | 23.979 | 42.254 | 24.751 | 15.817 | - | 92,95 | 95,92 | 94,95 | 92,35 | 93,04 | - |
| 4 | Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah. | - | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 31.800 | - | 2.600 | 6.949 | 7.022 | 6.997 | 15.589 | - | 37,14 | 92,65 | 87,78 | 87,46 | 49,02 |
| 5 | Penyusunan Kelengkapan Peraturan Kelembagaan Pemerintah Daerah | 409.000 | 117.825 | 700.050 | 235.400 | 286.900 | 773.400 | 287.843 | 108.091 | 616.959 | 226.055 | 226.055 | 650.278 | 70,38 | 91,74 | 88,13 | 96,03 | 78,79 | 84,08 |
| 6 | Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah | 40.000 | 46.525 | 72.000 | 92.100 | 51.900 | 135.000 | 37.298 | 39.363 | 67.677 | 82.050 | 37.829 | 117.904 | 93,25 | 84,61 | 94,00 | 89,09 | 72,89 | 87,34 |
| 7 | Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS | - | 130.000 | 131.300 | 195.050 | 612.300 | 276.200 | - | 77.493 | 123.835 | 180.995 | 550.363 | 233.797 | - | 59,61 | 94,31 | 92,79 | 89,88 | 84,65 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Fasilitasi Urusan Kepegawaian | 30.000 | 209.900 | 47.900 | 91.300 | 49.600 | 77.500 | 29.058 | 205.804 | 42.007 | 88.880 | 49.463 | 65.510 | 96,86 | 98,05 | 87,70 | 97,35 | 99,72 | 84,53 |
| 9 | Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring Roadmap Reformasi Birokrasi. | - | - | - | - | 82.100 | - | - | - | - | - | 54.420 | - | - | - | - | - | 66,29 | - |
| 10 | Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi. | - | - | - | 130.500 | - | 162.900 | - | - | - | 125.881 | - | 140.931 | - | - | - | 96,46 | - | 86,51 |
| 11 | Penyusunan sitem dan Prosedur Kerja. | 20.000 | - | - | 43.000 | 49.700 | 42.800 | 15.210 | - | - | 41.630 | 33.693 | 34.410 | 76,05 | - | - | 96,81 | 67,79 | 80,40 |
| 12 | Penerapan sistem e-Government | - | - | - | 106.200 | 116.200 | 118.500 | - | - | - | 99.068 | 82.193 | 109.769 | - | - | - | 93,28 | 70,73 | 92,63 |
| 13 | Standar Pelayanan Minimal | - | - | - | 41.400 | 51.700 | 53.100 | - | - | - | 40.404 | 42.371 | 47.715 | - | - | - | 97,59 | 81,96 | 89,86 |
| 14 | Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik | 35.000 | 105.000 | 329.900 | 260.300 | 248.900 | 177.800 | 26.833 | 96.856 | 297.061 | 253.142 | 229.897 | 160.351 | 76,67 | 92,24 | 90,05 | 97,25 | 92,37 | 90,19 |
| 15 | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prsedur Pengawasan | - | 21.560 | - | - | - | - | - | 20.536 | - | - | - | - | - | 95,25 | - | - | - | - |
| 16 | Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik | 40.000 | - | - | - | - | - | 27.726 | - | - | - | - | - | 69,32 | - | - | - | - | - |
| 17 | Peningkatan Semangat Kerja dan Aparatur Pemerintah Daerah | 425.000 | - | - | - | - | - | 409.673 | - | - | - | - | - | 96,39 | - | - | - | - | - |
| 18 | Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan. | 567.925 | - | 566.756 | - | - | - | 560.088 | - | 540.945 | - | - | - | 98,62 | - | 95,45 | - | - | - |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI. Bagian Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Rata-rata surat dan paket yang terkirim. | 117.520 | 112.260 | 118.783 | 76.640 | 58.384 | 136.124 | 112.032 | 105.225 | 108.656 | 64.247 | 50.253 | 126.418 | 95,33 | 93,73 | 91,47 | 83,83 | 86,07 | 92,87 |
| 2 | Terfasilitasinya pelayanan terhadap kebutuhan air, telpon, listrik di lingkungan setda, kantor Bupati dan Wakil Bupati serta Rumdin Setda. | 876.646 | 733.200 | 849.600 | 944.400 | 1.020.000 | 975.000 | 801.934 | 663.913 | 756.413 | 855.898 | 884.623 | 828.883 | 91,48 | 90,55 | 89,03 | 90,63 | 86,73 | 85,01 |
| 3 | Jumlah kendaraan yang terselesaikan perijinananya. | 45.000 | 35.000 | 54.945 | 58.400 | 75.000 | 98.975 | 29.243 | 31.277 | 53.362 | 57.685 | 67.416 | 69.186 | 64,98 | 89,36 | 97,12 | 98,78 | 89,89 | 69,90 |
| 4 | Jumlah ruangan yang dibersihkan di lingkungan setda Kab. Pematang. | 529.500 | 563.520 | 456.170 | 455.720 | 516.070 | 453.860 | 520.440 | 485.329 | 454.939 | 451.465 | 509.867 | 453.155 | 98,29 | 86,12 | 99,73 | 99,07 | 98,80 | 99,84 |
| 5 | Penyediaan Alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan sekertariat daerah kab. pematang. | 72.970 | 102.000 | 125.350 | 123.300 | 123.000 | 84.000 | 69.925 | 101.260 | 123.445 | 121.648 | 119.626 | 76.797 | 95,83 | 99,27 | 98,48 | 98,66 | 97,26 | 91,43 |
| 6 | Penyediaan Barang cetakan dan layanan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Setda Kab. Pematang | 79.650 | 91.612 | 144.480 | 146.950 | 141.907 | 145.590 | 76.804 | 90.530 | 143.120 | 123.828 | 141.597 | 138.043 | 96,43 | 98,82 | 99,06 | 84,27 | 99,78 | 94,82 |
| 7 | Penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 170.180 | 126.700 | 131.685 | 266.006 | 201.236 | 173.270 | 155.690 | 110.869 | 130.144 | 256.294 | 115.044 | 143.275 | 91,49 | 87,51 | 98,83 | 96,35 | 57,17 | 82,69 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Penyediaan layanan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan upacara, rapat, penerimaan tamu dll. | 340.800 | 235.750 | 205.530 | 29.200 | 434.693 | 315.645 | 329.884 | 230.098 | 199.635 | 25.926 | 433.864 | 315.114 | 96,80 | 97,60 | 97,13 | 88,79 | 99,81 | 99,83 |
| 9 | Penyediaan logistik rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga pada dinas di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 90.000 | 28.750 | 28.900 | 29.200 | 25.000 | 31.800 | 87.026 | 28.175 | 26.690 | 25.926 | 19.125 | 31.798 | 96,70 | 98,00 | 92,35 | 88,79 | 76,50 | 99,99 |
| 10 | Fasilitasi pelayanan terhadap kebutuhan bahan bacaan di lingkungan setda, kantor Bupati dan Wakil Bupati, serta rumdin Sekda. | 89.430 | 101.050 | 94.500 | 113.000 | 102.000 | 102.000 | 88.626 | 91.550 | 88.500 | 101.587 | 98.580 | 101.978 | 99,10 | 90,60 | 93,65 | 89,90 | 96,65 | 99,98 |
| 11 | Penyediaan layanan pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 25 unit dan bahan kostum kelengkapan upacara sebanyak 1 paket. | 30.000 | 28.750 | 55.000 | - | - | 37.450 | 28.320 | 28.175 | 52.703 | - | - | 34.405 | 94,40 | 98,00 | 95,82 | - | - | 91,87 |
| 12 | Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman selama 12 bulan | 1.037.780 | 1.013.700 | 1.367.800 | 1.218.600 | 1.300.900 | 1.282.250 | 1.008.721 | 996.122 | 1.310.467 | 1.216.324 | 1.298.134 | 1.277.534 | 97,20 | 98,27 | 95,81 | 99,81 | 99,79 | 99,63 |
| 13 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 546.195 | 652.445 | 605.910 | 634.425 | 617.180 | 1.069.170 | 523.667 | 498.901 | 542.943 | 580.962 | 611.304 | 1.020.019 | 95,88 | 76,47 | 89,61 | 91,57 | 99,05 | 95,40 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Terpenuhinya kebutuhan keamanan di lingkungan Setda, kantor Bupati dan Wakil Bupati serta rumdin Sekda, sarana dan prasarana 6 fillbad dan 10 handy talky. | 88.540 | 61.195 | 84.267 | 100.922 | 102.319 | 55.455 | 71.510 | 57.870 | 83.519 | 100.256 | 100.102 | 54.320 | 80,77 | 94,57 | 99,11 | 99,34 | 97,83 | 97,95 |
| 15 | Penyediaan layanan jasa pemeliharaan kesehatan bagi KDH dan WKDH beserta keluarganya. | 132.500 | 170.000 | 191.500 | 207.650 | - | 77.400 | 93.160 | 109.262 | 169.955 | 121.733 | - | - | 70,31 | 64,27 | 88,75 | 58,62 | - | - |
| 16 | Pengadaan kendaraan dinas / oprasional. | - | - | 90.200 | 58.400 | - | - | - | - | 73.033 | 57.685 | - | - | - | - | 80,97 | 98,78 | - | - |
| 17 | Penyediaan kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan di rumah jabatan KDH dan WKDH dan rumdin Sekda | 435.000 | 351.897 | 779.550 | 371.730 | 193.124 | 423.660 | 423.686 | 347.972 | 764.518 | 337.960 | 176.649 | 416.552 | 97,40 | 98,88 | 98,07 | 90,92 | 91,47 | 98,32 |
| 18 | Penyediaan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan kantor di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 92.500 | 89.000 | 162.050 | 123.700 | 39.330 | 95.510 | 81.548 | 77.800 | 156.413 | 111.683 | 34.943 | 94.160 | 88,16 | 87,42 | 96,52 | 90,29 | 88,85 | 98,59 |
| 19 | Penyediaan peralatan rumah tangga memenuhi kebutuhan rumah jabatan KDH / WKDH dan rumdin Sekda | 100.000 | 101.350 | 93.850 | 115.650 | 31.350 | 244.550 | 92.625 | 100.850 | 92.900 | 111.450 | 30.375 | 199.599 | 92,63 | 99,51 | 98,99 | 96,37 | 96,89 | 81,62 |
| 20 | Penyediaan peralatan kantor untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Setda Kab. Pematang | 69.450 | 64.770 | 247.350 | 568.400 | - | 374.750 | 44.800 | 59.650 | 220.765 | 524.396 | - | 342.870 | 64,51 | 92,10 | 89,25 | 92,26 | - | 91,49 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Penyediaan mebeler untuk memenuhi kebutuhan di kantor dan rumah jabatan KDH/WKDH dan lingkungan Setda Kab. Pematang | 200.000 | 171.000 | 116.100 | 62.500 | 86.350 | 86.350 | 149.163 | 166.350 | 108.775 | 61.399 | 72.850 | 81.650 | 74,58 | 97,28 | 93,69 | 98,24 | 84,37 | 94,56 |
| 22 | Penyediaan komputer dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan sekretariat daerah kabupaten pematang. | 86.950 | 311.080 | 221.472 | 315.956 | 324.920 | 244.130 | 81.057 | 303.971 | 177.960 | 54.095 | 309.280 | 222.052 | 93,22 | 97,71 | 80,35 | 17,12 | 95,19 | 90,96 |
| 23 | Pemeliharaan rumah jabatan KDH dan WKDH sebanyak 2 unit | 200.000 | 100.600 | 255.000 | 243.000 | 448.840 | 530.340 | 193.104 | 96.845 | 254.779 | 241.533 | 444.581 | 528.859 | 96,55 | 96,27 | 99,91 | 99,40 | 99,05 | 99,72 |
| 24 | Pemeliharaan rumah dinas sekda sebanyak 2 unit (sekda san guest house) | 75.000 | 75.000 | 61.000 | 127.000 | 246.175 | 69.000 | 67.904 | 74.387 | 60.869 | 126.843 | 203.632 | 68.920 | 90,54 | 99,18 | 99,79 | 99,88 | 82,72 | 99,88 |
| 25 | Pemeliharaan sarana dan prasarana sebanyak 15 bangunan Pemeliharaan bangunan kantor di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 77.500 | 90.000 | 221.850 | 555.205 | 698.205 | 714.300 | 66.533 | 77.505 | 221.626 | 555.026 | 694.612 | 714.247 | 85,85 | 86,12 | 99,90 | 99,97 | 99,49 | 99,99 |
| 26 | Pemeliharaan mobil jabatan KDH/WKDH seanyak 4 unit | 80.000 | 162.050 | 212.160 | 255.780 | 268.810 | 257.400 | 76.796 | 114.191 | 158.635 | 219.214 | 223.050 | 171.663 | 96,00 | 70,47 | 74,77 | 85,70 | 82,98 | 66,69 |
| 27 | Pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Setda Kab. Pematang. | 945.000 | 826.600 | 815.010 | 1.101.840 | 997.120 | 815.103 | 881.161 | 805.745 | 812.542 | 1.069.158 | 996.740 | 813.467 | 93,24 | 97,48 | 99,70 | 97,03 | 99,96 | 99,80 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan / dinas. | 53.625 | 45.000 | 77.800 | 105.000 | 87.600 | 114.000 | 50.960 | 44.965 | 77.795 | 91.355 | 76.110 | 101.250 | 95,03 | 99,92 | 99,99 | 87,00 | 86,88 | 88,82 |
| 29 | Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. | 36.000 | 70.000 | 100.200 | 90.500 | 96.000 | 100.500 | 36.000 | 69.670 | 99.500 | 90.067 | 95.606 | 100.400 | 100,00 | 99,53 | 99,30 | 99,52 | 99,59 | 99,90 |
| 30 | Pemeliharaan peralatan rumah dinas/ jabatan. | 31.375 | 72.000 | 54.000 | 54.000 | 51.000 | 66.000 | 31.375 | 52.903 | 45.902 | 45.280 | 50.995 | 65.882 | 100,00 | 73,48 | 85,00 | 83,85 | 99,99 | 99,82 |
| 31 | Pemeliharaan peralatan gedung kantor di lingkungan sekretariat daerah. | 61.000 | 100.000 | 87.500 | 98.000 | 220.000 | 121.000 | 60.667 | 99.770 | 87.185 | 97.989 | 203.052 | 120.853 | 99,45 | 99,77 | 99,64 | 99,99 | 92,30 | 99,88 |
| 32 | Pemeliharaan mebeler di lingkungan sekretariat daerah. | 50.000 | 55.000 | 66.500 | 77.250 | 161.250 | 85.000 | 49.886 | 54.939 | 66.490 | 77.203 | 161.224 | 84.890 | 99,77 | 99,89 | 99,98 | 99,94 | 99,98 | 99,87 |
| 33 | Tersedianya pakaian dinas untuk KDH dan WKDH (4 stel PSL, 4 stel PDU, 4 stel PSR, dan 10 stel PDH) | 93.480 | 85.000 | 99.575 | 99.750 | 109.110 | 98.020 | 66.316 | 81.800 | 96.049 | 92.850 | 101.740 | 94.940 | 70,94 | 96,24 | 96,46 | 93,08 | 93,25 | 96,86 |
| 34 | Tersedianya pakaian batik tradisional 354 pcs dan pakaian OR 21 pcs untuk KDH dan WKDH sebanyak 77 pakaian | 136.000 | 140.000 | 140.850 | 154.400 | 165.350 | 170.600 | 132.610 | 138.808 | 140.846 | 151.219 | 163.846 | 169.469 | 97,51 | 99,15 | 100,00 | 97,94 | 99,09 | 99,34 |
| 35 | Sosialisasi peraturan perundang - undangan | - | - | - | 62.225 | - | - | - | - | - | 41.301 | - | - | - | - | - | 66,37 | - | - |
| 36 | Terlaksananya publikasi / penyebaran informasidan dialog dengan tokoh masyarakat, orsos dan ormas. | 200.000 | 165.000 | 163.815 | 227.900 | 296.982 | 218.066 | 190.768 | 152.075 | 157.095 | 211.340 | 284.910 | 208.235 | 95,38 | 92,17 | 95,90 | 92,73 | 95,94 | 95,49 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Tersedianya cinderamata, sewa penginapan dan jamuan makan dan minum dalam rangka penerimaan tamu di kabupaten pematang. | 200.000 | 190.013 | 192.096 | 194.510 | - | 213.160 | 188.949 | 187.591 | 170.491 | 166.247 | - | 172.652 | 94,47 | 98,73 | 88,75 | 85,47 | - | 81,00 |
| 38 | Terselenggaranya rapat koordinasi unsur muspida. | 340.500 | - | - | - | - | - | 313.425 | - | - | - | - | - | 92,05 | - | - | - | - | - |
| 39 | Terlaksananya kunjungan kerja / inspeksi KDH / WKDH dan fasilitasi bagi ulama dan tokoh masyarakat. | 119.000 | 125.000 | 235.600 | 235.000 | 151.600 | 151.600 | 91.230 | 124.966 | 129.518 | 139.179 | 151.576 | 94.221 | 76,66 | 99,97 | 54,97 | 59,23 | 99,98 | 62,15 |
| 40 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. | 390.000 | 300.000 | 480.000 | 489.600 | 361.800 | 611.800 | 374.914 | 260.719 | 401.723 | 391.652 | 215.590 | 597.720 | 96,13 | 86,91 | 83,69 | 79,99 | 59,59 | 97,70 |
| 41 | Penyusunan buku RKBMD sebanyak 10 buku, buku DKBMD sebanyak 10 buku, Buku inventaris BMD sebanyak 10 buku, Buku hasil pengadaan BDM sebanyak 10 Buku | 51.250 | 55.450 | 47.050 | 48.850 | 48.850 | 46.675 | 44.860 | 47.971 | 41.831 | 40.833 | 41.130 | 40.397 | 87,53 | 86,51 | 88,91 | 83,59 | 84,20 | 86,55 |
| 42 | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | 94.039 | 299.950 | 103.540 | 106.195 | 86.895 | 96.048 | 52.905 | 251.083 | 80.739 | 93.136 | 3.763 | 87.922 | 56,26 | 83,71 | 77,98 | 87,70 | 4,33 | 91,54 |
| 43 | Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. | - | - | 53.380 | 62.950 | 65.925 | 55.600 | - | - | 45.607 | 58.948 | 57.071 | 52.846 | - | - | 85,44 | 93,64 | 86,57 | 95,05 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pemalang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VII. Bagian Administrasi Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang - undangan jasa konstruksi peraturan lainnya | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 26.890 | 24.944 | 24.716 | 24.704 | 24.319 | 22.887 | 99,59 | 99,78 | 98,86 | 98,82 | 97,28 | 95,36 |
| 2 | Pemberdayaan pengusaha jasa konstruksi (instansi pemerintah, perseorangan dan badan usaha) | - | - | - | 75.000 | 50.000 | 96.255 | - | - | - | 72.378 | 49.209 | 90.772 | - | - | - | 96,50 | 98,42 | 94,30 |
| 3 | peraturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi | 25.000 | - | - | - | 712.800 | - | 24.680 | - | - | - | 69.478 | - | 98,72 | - | - | - | 9,75 | - |
| 4 | Pemberdayaan penyelia jasa konstruksi | 50.000 | - | 33.400 | - | - | - | 41.805 | - | 24.392 | - | 32.241 | - | 83,61 | - | 73,03 | - | - | - |
| 5 | Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa kostruksi | 46.300 | 40.000 | 30.000 | 60.050 | 71.280 | 245.850 | 42.726 | 38.585 | 26.560 | 50.498 | 69.478 | 220.689 | 92,28 | 96,46 | 88,53 | 84,09 | 97,47 | 89,77 |
| 6 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 50.000 | - | 17.875 | 30.075 | - | 60.775 | 44.020 | - | 15.840 | 28.553 | - | 57.605 | 88,04 | - | 88,62 | 94,94 | - | 94,78 |
| 7 | Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 165.700 | - | 200.850 | 300.000 | - | 259.540 | 161.637 | - | 196.445 | 286.571 | - | 219.991 | 97,55 | - | 97,81 | 95,52 | - | 84,76 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (100 buku) | 31.000 | 30.000 | 33.550 | 20.000 | 39.985 | 27.086 | 30.097 | 28.292 | 32.720 | 19.714 | - | 26.126 | 97,09 | 94,31 | 97,53 | 98,57 | - | 96,46 |
| 9 | Fasilitasi unit layanan pengendalian barang / jasa pemerintah | - | 40.000 | 74.825 | 258.800 | 303.265 | 394.804 | - | 38.418 | 73.398 | 244.611 | 283.922 | 359.788 | - | 96,05 | 98,09 | 94,52 | 93,62 | 91,13 |
| 10 | Fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik | 275.000 | 200.000 | 214.500 | 324.000 | 262.625 | 295.505 | 265.686 | 183.137 | 196.266 | 294.459 | 256.515 | 277.400 | 96,61 | 91,57 | 91,50 | 90,88 | 97,67 | 93,87 |
| VII. Bagian Perekonomian dan SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya | - | 30.000 | 50.000 | 75.000 | 80.000 | 100.000 | - | 30.000 | 49.427 | 70.919 | 78.644 | 99.840 | - | 100,00 | 98,85 | 94,56 | 98,31 | 99,84 |
| 2 | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan | 190.400 | 158.000 | 370.000 | 375.000 | 275.960 | 370.000 | 183.479 | 154.859 | 369.694 | 372.313 | 234.203 | 361.672 | 96,37 | 98,01 | 99,92 | 99,28 | 84,87 | 97,75 |
| 3 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 62.000 | 50.000 | 55.000 | 45.000 | 49.614 | 52.000 | 58.902 | 29.996 | 48.130 | 40.002 | 42.469 | 45.331 | 95,00 | 59,99 | 87,51 | 88,89 | 85,60 | 87,17 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengawasan penanaman modal | 37.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 | 167.500 | 310.000 | 35.481 | 32.841 | 49.056 | 68.961 | 145.725 | 254.309 | 95,89 | 93,83 | 98,11 | 68,96 | 87,00 | 82,04 |
| 5 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian. | - | 486.860 | 399.661 | 612.103 | 531.869 | 513.733 | - | 338.111 | 385.578 | 594.811 | 491.295 | 455.434 | - | 69,45 | 96,48 | 97,17 | 92,37 | 88,65 |
| 6 | Koordinasi pemantauan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 76.519 | - | - | - | - | - | 76,52 |
| 7 | Koordinasi pemantauan pengendalian inflasi daerah (PPID) | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 79.386 | - | - | - | - | - | 79,39 |
| 8 | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. | 40.000 | - | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 75.000 | 37.180 | - | 19.280 | 15.575 | 20.531 | 66.874 | 92,95 | - | 96,40 | 77,88 | 82,12 | 89,16 |
| VIII. Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak | 85.000 | 30.000 | 41.000 | - | 48.000 | 50.000 | 83.304 | 27.311 | 35.493 | 37.169 | 39.006 | 37.762 | 98,00 | 91,04 | 86,57 | - | 81,26 | 75,52 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | 25.000 | 10.000 | 31.000 | 37.000 | 37.000 | 40.000 | 22.981 | 8.890 | 28.418 | 35.717 | 35.077 | 35.594 | 91,92 | 88,90 | 91,67 | 96,53 | 94,80 | 88,98 |
| 3 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 8.330 | 7.500 | 10.000 | 21.770 | 8.935 | 6.479 | 6.237 | 2.156 | 3.440 | 90,71 | 89,35 | 64,79 | 74,87 | 28,75 | 34,40 |
| 4 | Peningkatan kapasitas jaringan dan kelembagaan Pemberdayaan perempuan dan anak | 30.000 | 35.000 | 75.500 | 66.000 | 50.000 | 55.000 | 27.560 | 31.061 | 68.025 | 61.167 | 49.515 | 48.473 | 91,87 | 88,75 | 90,10 | 92,68 | 99,03 | 88,13 |
| 5 | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 13.000 | 7.500 | 40.000 | 9.673 | 4.820 | 3.110 | 6.396 | 4.964 | 34.907 | 87,94 | 64,27 | 41,47 | 49,20 | 66,19 | 87,27 |
| 6 | Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan | - | 12.500 | 18.500 | 126.670 | 100.000 | 50.000 | - | 11.215 | 14.255 | 109.834 | 73.262 | 44.504 | - | 89,72 | 77,05 | 86,71 | 73,26 | 89,01 |
| 7 | Fasilitasi operasional komisi penanggulangan AIDS | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 78.778 | - | - | - | - | - | 78,78 |
| 8 | Monitoring evaluasi dan pelaporan | - | - | 75.000 | 90.000 | 30.000 | 60.000 | - | - | 62.725 | 72.283 | 28.070 | 55.236 | - | - | 83,63 | 80,31 | 93,57 | 92,06 |
| 9 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi penyandang penyakit social. | - | - | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | - | - | 20.000 | 29.213 | 29.013 | 58.868 | - | - | 100,00 | 97,38 | 96,71 | 98,11 |
| 10 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial | - | - | 40.000 | 110.000 | 120.000 | 135.000 | - | - | 38.695 | 88.831 | 112.240 | 113.835 | - | - | 96,74 | 80,76 | 93,53 | 84,32 |
| 11 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit social. | - | - | 95.000 | 190.000 | 150.000 | 200.000 | - | - | 85.760 | 177.817 | 17.866 | 144.342 | - | - | 90,27 | 93,59 | 11,91 | 72,17 |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kab. Pematang | Target Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Realisasi Renstra PD Tahun Ke- (Rp. 000) | | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi | - | 35.000 | 37.000 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | - | 30.864 | 18.190 | 10.030 | 12.845 | 10.555 | - | 88,18 | 49,16 | 66,87 | 85,63 | 81,19 |
| 13 | Pemassalan olahraga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat | 50.000 | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 46.955 | 24.100 | 33.050 | 20.000 | 20.000 | 21.550 | 93,91 | 96,40 | 94,43 | 100,00 | 100,00 | 97,95 |
| 14 | Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah | 55.000 | - | - | - | - | - | 53.225 | - | - | - | - | - | 96,77 | - | - | - | - | - |
| 15 | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | - | 230.000 | - | - | - | 50.000 | - | 225.989 | - | - | - | 1.640 | - | 98,26 | - | - | - | 3,28 |
| 16 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama | - | 105.000 | 314.000 | 225.000 | 275.000 | 170.000 | - | 104.789 | 281.472 | 174.042 | 267.048 | 147.503 | - | 99,80 | 89,64 | 77,35 | 97,11 | 86,77 |
| 17 | Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | - | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | - | 122.980 | 120.412 | 90.826 | 76.572 | 93.601 | - | 98,38 | 96,33 | 90,83 | 95,72 | 93,60 |
| 18 | Fasilitasi petugas pendamping haji daerah dan jemaah haji dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan | - | 365.000 | 348.000 | 635.482 | 413.000 | 580.000 | - | 334.338 | 285.700 | 552.760 | 400.853 | 465.090 | - | 91,60 | 82,10 | 86,98 | 97,06 | 80,19 |

25. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Pada tahun 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016

| Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|--|----------------|----------------|------------|
| Belanja | 45.949.473.000 | 42.489.842.000 | 92,47 |
| Belanja Tidak Langsung | 18.023.169.000 | 17.529.761.000 | 97,26 |
| Belanja Langsung | 27.926.304.000 | 24.960.080.000 | 89,38 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | 3.459.631.000 | |

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sebesar Rp.45.949.473.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.18.023.169.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 27.926.304.000. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp.17.529.761.420,-(97,26%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 24.960.080.747,- (89,38%). Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016, dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016

| Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Belanja | 221.508.685.000 | 203.186.625.000 | 91,73 |
| Belanja Tidak Langsung | 95.763.218.000 | 89.344.826.000 | 93,30 |
| Belanja Langsung | 125.745.467.000 | 113.841.799.000 | 90,53 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | 18.322.060.000 | |

Dari tabel diatas diketahui total anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang periode 2011 – 2016 sebesar Rp. 221.508.685.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.95.763.218.000,- dan Belanja Langsung Rp.125.745.467.000,- Dari Belanja tersebut terealisasi sebesar Rp.203.186.625.167,- (91,73%) yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 89.344.826.420,- (93,30%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 113.841.798.747,- (90,53%). Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.15. di bawah ini :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011
– 2016
dalam ribuan (Rp)

| Uraian | Anggaran pada tahun ke- | | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran (%) | | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja | 29.166.40 1 | 30.865.55 5 | 37.812.17 4 | 38.037.25 2 | 39.677.83 1 | 46.132.51 7 | 27.572.89 8 | 28.512.71 1 | 31.957.17 1 | 35.801.20 2 | 36.852.80 1 | 42.635.65 7 | 95 % | 93 % | 84 % | 95 % | 94 % | 92 % | 16,67 % | 16,67% |
| Belanja Tidak Langsung | 13.551.69 1 | 14.094.59 2 | 18.683.90 6 | 15.146.44 3 | 16.263.41 7 | 18.206.21 3 | 13.068.39 2 | 13.711.01 6 | 14.268.87 7 | 14.932.72 9 | 15.834.05 2 | 17.675.57 6 | 96 % | 97 % | 76 % | 99 % | 97 % | 97 % | 16,67% | 16,67% |
| Belanja Langsung | 15.614.71 0 | 16.770.96 3 | 19.128.26 8 | 22.890.80 9 | 23.414.41 4 | 27.926.30 4 | 14.504.50 6 | 14.801.69 5 | 17.688.29 4 | 20.868.47 4 | 21.018.74 9 | 24.960.08 1 | 93 % | 88 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 16,67 % | 16,67% |

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Guna mewujudkan apa yang menjadi Visi Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021 yaitu menuju **Kabupaten Pemalang hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera**, Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahannya yang dirumuskan dalam Misi Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021, antara lain :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Merujuk pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tantangan pelayanan yang harus dihadapi yaitu :

“ Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif “.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu dilakukan identifikasi masalah di Sekretariat Daerah agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki SOP. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh belum sepenuhnya Perangkat Daerah pelayanan publik yang menyusun dan mengimplementasikan SPP dan Maklumat Pelayanan.
2. PD pelayanan publik belum menyusun dan mengimplementasikan SPP dan Maklumat Pelayanan.
3. Belum meratanya peningkatan kapasitas bagi PPKom dan PPHP di lingkup Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
4. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
5. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur;
6. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
7. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah;
8. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
9. Kurang optimalnya penggunaan prasarana dan sarana.

3.1.2 Analisis Masalah

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu dengan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*). Hasil analisis digunakan untuk menetapkan strategi apa yang dipilih didalam menjalankan organisasi.

Analisis SWOT untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- *Kekuatan (Strengths)*, yaitu situasi dan kondisi internal positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berkiprah di dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kekuatan yang dimiliki antara lain :
 - a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas;
 - b. Tersedianya SDM aparatur yang mencukupi;
 - c. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan;
 - d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- *Kelemahan (Weaknesses)* yaitu situasi dan kondisi internal negatif yang dapat menghambat langkah organisasi di dalam mewujudkan visi dan misinya. Komponen kelemahan yang ditengarai ada antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur;
 - c. Kurangnya koordinasi antar PD;
 - d. Kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasarana.
- *Peluang (Opportunities)* yaitu situasi dan kondisi eksternal positif yang mempermudah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didalam mewujudkan visi-misinya. Komponen peluang yang dapat dijumpai antara lain :
 - a. Peningkatan kinerja Aparatur PNS;
 - b. Mewujudkan pelayanan publik yang prima;
 - c. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - d. Peningkatan perekonomian daerah dan kerjasama antar daerah.
- *Ancaman (Threats)*
 - a. Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;
 - b. Pelayanan dianggap sebagai sesuatu rutinitas;
 - c. Kurang tertibnya administrasi transparansi dan akuntabilitas;
 - d. Stabilitas ekonomi global yang tidak menentu.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, dengan menggunakan Analisis SWOT, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. *Strategi Strengths Opportunity*, yaitu mendayagunakan kekuatan, memanfaatkan peluang.
- b. *Strategi Strengths Threats*, yaitu mendayagunakan kekuatan, hindari ancaman.
- c. *Strategi Weakness Opportunity*, yaitu mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang
- d. *Strategi Weakness Threats*, yaitu meminimalkan kelemahan, menghindari ancaman.

Sebagai hasil interaksi analisis lingkungan intenal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut dituangkan ke dalam tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Analisis Lingkungan Internal
dan eksternal

| ALI ALE | Kekuatan (strenghts/S) | Kelemahan (Weakness/W) |
|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur 3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya 2) Kurang optimalnya kinerja SDM 3) Kurangnya koordinasi antar PD 4) Kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasaran. |
| PELUANG (O) | S+O | W+O |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kinerja aparatur PNS 2) Mewujudkan pelayanan prima 3) Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 4) Peningkatan perekonomian daerah kerjasama dan penanaman modal. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dan penanaman modal (S2-O4) 2) Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (S3,4-O2) 3) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur PNS (S1,3-O1,2). | <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar PD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1, 3-O3) 2) Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3-O2). |
| ANCAMAN (T) | S+T | W+T |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang profesional 2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 3) Pelayanan dianggap sebagai rutinitas 4) Stabilitas ekonomi global yang kurang menentu. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas 2) Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk dapat 2) Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas. |

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa dalam menghadapi tantangan keadaan Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih merumuskan visi pembangunan sebagai berikut “**Kabupaten Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera**”

Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diangankan menjadi nyata. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. Pemalang Hebat juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, telah terpilih pasangan Bupati-Wakil Bupati periode 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 15 Pebruari 2016. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang wajib menyusun RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus telah ditetapkan paling lambat enam (6) bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 menjadi pedoman kerja bagi seluruh PD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi keenam Bupati Pemalang yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”**.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 menyebutkan bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sehubungan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Provinsi Jawa Tengah, maka program dan kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak ada yang berhubungan langsung dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.4 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Pemalang disusun dengan didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031, kebijakan penataan ruang Kabupaten Pemalang adalah :

1. Kebijakan pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
2. Kebijakan peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
3. Kebijakan pengembangan prasarana Daerah dengan strategi;
4. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
5. Kebijakan pengurangan kegiatan budidaya pada lahan kawasan lindung;
6. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
7. Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
8. Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
9. Kebijakan pengembangan industri;
10. Kebijakan pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
11. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan;
12. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Daerah.

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang dalam rangka perwujudan pola ruang ditetapkan kawasan-kawasan strategis daerah yang meliputi :

A. Kawasan Strategis Bidang Ekonomi

- (1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana meliputi :
 - a. Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Pemalang - Kecamatan Taman – Kecamatan Petarukan - Kecamatan Ampelgading - Kecamatan Comal – Kecamatan Ulujami;
 - b. Kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Randudongkal;
 2. Kawasan Perkotaan Belik; dan
 3. Kawasan Perkotaan Moga.
 - c. Kawasan agropolitan PEKAN TAMAN GADING dengan komoditas unggulan buah Mangga meliputi:
 1. Kecamatan Pemalang;
 2. Kecamatan Petarukan;
 3. Kecamatan Taman; dan
 4. Kecamatan Ampelgading.
 - d. Kawasan agropolitan WALIK SARI MADU dengan komoditas unggulan sayur-sayuran meliputi:
 1. Kecamatan Watukumpul;
 2. Kecamatan Belik;
 3. Kecamatan Pulosari;
 4. Kecamatan Moga;
 5. Kecamatan Warungpring; dan
 6. Kecamatan Randudongkal.
 - e. Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN meliputi:
 1. Kecamatan Pemalang;
 2. Kecamatan Taman;
 3. Kecamatan Ulujami; dan
 4. Kecamatan Petarukan.
 - f. Kawasan strategis perkotaan Bantarbolang dan Bodeh; dan
 - g. Kawasan strategis peruntukan industri Randudongkal.
- (2) Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) berperan mengotimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.
- (3) Kawasan strategis pusat pelayanan baru di wilayah bagian tengah dan selatan berperan mendorong pertumbuhan wilayah bagian tengah dan selatan Daerah.
- (4) Kawasan strategis agropolitan PEKAN TAMAN GADING berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas buah mangga.

- (5) Kawasan strategis agropolitan WALIK SARI MADU berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas sayur sayuran.
 - (6) Kawasan strategis minapolitan PETA IKAN berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.
 - (7) Kawasan strategis perkotaan Bantarbolang dan Bodeh berperan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah bagian tengah.
 - (8) Kawasan strategis peruntukan industri Randudongkal berperan mendorong perkembangan industri wilayah Daerah bagian tengah.
- B. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya;
- (1) Kawasan perbatasan, pengembangan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana kawasan dalam rangka mengurangi dampak sosial ekonomi, kawasan tersebut meliputi:
 - a. Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal;
 - b. Desa Rowosari dan Desa Tasikrejo di Kecamatan Ulujami;
 - c. Desa Tumbal di Kecamatan Comal;
 - d. Desa Jatirojom, Desa Muncang, dan Desa Kesesirejo di Kecamatan Bodeh;
 - e. Desa Tambakrejo dan Desa Lawangrejo di Kecamatan Pemalang;
 - f. Desa Plakaran di Kecamatan Moga;
 - g. Desa Mereng di Kecamatan Warungpring;
 - h. Desa Clekatakan dan Desa Gambuhan di Kecamatan Pulosari;
 - i. Desa Belik di Kecamatan Belik; dan
 - j. Desa Tambi, Desa Tlagasana, Desa Tundagan, dan Desa Medayu di Kecamatan Watukumpul.
 - (2) Kawasan pemuda dan olahraga yang berada di Kecamatan Pemalang, pengembangan kawasan ini bertujuan untuk, menampung minat, bakat, dan kreasi pemuda; dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan.
- C. Kawasan Strategis Bidang bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi berupa kawasan gardu pandang dan pos pengamat Gunung Slamet di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari.
- D. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air meliputi :
 - a. Kawasan resapan mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan
 - b. kawasan resapan mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga.
 - (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro meliputi :
 - a. kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - b. kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan; dan
 - c. kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

Sehubungan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang dan KLHS, maka tidak ada program dan kegiatan yang berhubungan langsung.

3.5 ISU – ISU STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju *good governance dan clean government*. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah perlu memantapkan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan sumber daya aparatur daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kinerjanya. Selain itu, tidak kalah pentingnya tingkat kesejahteraan aparatur daerah yang perlu diperhatikan. Diharapkan dengan diberlakukannya *reward and punishment*, yaitu pemberian penghargaan atau tambahan penghasilan bagi yang berprestasi atau yang memiliki beban kerja yang tinggi. Sedangkan bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi atau hukuman.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya akumulasi laba perusda per tahun;
2. Masih rendahnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Setda;
4. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja;
5. Masih rendahnya skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. Belum semua kewenangan daerah sesuai dengan tupoksi organisasi;
7. Belum semua kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi;
8. Belum semua kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi;
9. Belum semua usulan raperda yang diajukan menjadi perda.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun Visi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”**. Sedangkan Misi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

Misi 6

“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah ”

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021 yaitu :

Tujuan :

“ Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif ”.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;
7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.

Secara rinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 - 2021

| TUJUAN | | SASARAN | |
|--------|--|---------|---|
| 1. | Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif. | 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah; |
| | | 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah; |
| | | 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik; |
| | | 4. | Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah; |
| | | 5. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama; |
| | | 6. | Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah; |
| | | 7. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah; |
| | | 8. | Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik. |

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak indikator.

Indikator pada masing-masing sasaran adalah pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 - 2021

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|---------|---|-------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah; | 1. | Nilai LPPD yang diperoleh. |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah; | 2. | Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh. |
| | | 3. | Nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh. |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik; | 4. | Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik. |
| 4. | Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah; | 5. | Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan. |
| 5. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama; | 6. | Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi. |
| 6. | Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah; | 7. | Persentase kegiatan/ paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi. |
| 7. | Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah; | 8. | Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda. |
| 8. | Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik. | 9. | Persentase pertumbuhan laba perusda per tahun. |

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang terukur. Gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 – 2021 dapat terlihat pada tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 – 2021**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA |
|--------|--|---|--------|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif. | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | Na | Na | Na | 56,35 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. | 1. Nilai LPPD yang diperoleh. | Nilai | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. | 2. Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh. | Nilai | 50 | 50 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| | | 3. Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh. | Nilai | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 4. Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik. | Skor | 77,00 | 76,00 | 75,31 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA | |
|--------|--|---|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | 4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. | 5. Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama. | 6. Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah. | 7. Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi. | % | 3,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah. | 8. Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda. | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik; | 9. Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah) | Rp. | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |

Terkait dengan tujuan, sasaran serta pencapaian target kinerja pada tabel diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun menghambat pencapaiannya. Untuk itu dilakukan analisis terhadap baik faktor internal maupun eksternal sehingga diperoleh rumusan strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal.

Dalam penentuan strategi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Pengembangan kapasitas, kualitas dan etos kerja Aparatur;
2. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh;
3. Penerapan SPP, Maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan pada Tabel 3.1 diatas, maka strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dan penanaman modal;
2. Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas;
5. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;
6. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
7. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima;
8. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah;
9. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas.

Sedangkan kebijakan yang akan ditempuh oleh dalam kurun waktu 5 tahun ke depan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang dalam rangka upaya mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan adalah:

1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas;
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi tingkat kesejahteraan yang layak;
6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel;
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan;
9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;
10. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan pelayanan publik;
11. Peningkatan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi kehidupan beragama;
12. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
13. Mempertahankan dan peningkatan penerapan ISO 9001: 2008.

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tersebut diatas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2016 -2021 terlihat pada tabel 4.4. sebagai berikut :

Tabel 4.4

**PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 – 2021**

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----------|--|--|-------------------|
| 1. | Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau sumber daya air lainnya. | 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. | Bag. Perekonomian |
| 2. | Program pengaturan jasa konstruksi. | 2. Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. | Bag. Pembangunan |
| 3. | Program pemberdayaan jasa konstruksi. | 3. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha). | Bag. Pembangunan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|--|--|------------------|
| 4. | Program pengawasan jasa konstruksi. | 4. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. | Bag. Pembangunan |
| 5. | Program pengembangan data/informasi. | 5. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. | Bag. Pembangunan |
| | | 6. Penyusunan buku data monografi kecamatan. | Bag. Tapem |
| | | 7. Sistem informasi manajemen pemerintahan desa (SIMPEMDES). | Bag. Tapem |
| 6. | Program perencanaan pembangunan daerah. | 8. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | Bag. Tapem |
| | | 9. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. | Bag. Pemnagunan |
| 7. | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. | 10. Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang pertanahan. | Bag. Tapem |
| | | 11. Rapat koordinasi di bidang pertanahan. | Bag. Tapem |
| 8. | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. | 12. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. | Bag. Kesra |
| 9. | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | 13. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan. | Bag. Kesra |
| | | 14. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | Bag. Kesra |
| | | 15. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. | Bag. Kesra |
| 10. | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. | 16. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. | Bag. Kesra |
| | | 17. Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan. | Bag. Kesra |
| | | 18. Fasilitasi operasional komisi penanggulangan AIDS. | Bag. Kesra |
| 11. | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. | 19. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. | Bag. Kesra |
| | | 20. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. | Bag. Kesra |
| | | 21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. | Bag. Kesra |
| 12. | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | 22. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. | Bag. Kesra |
| | | 23. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. | Bag. Kesra |
| | | 24. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. | Bag. Kesra |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|---|--|--|-------------------|
| 13. | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. | 25. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. | Bag. Perekonomian |
| | | 26. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. | Bag. Perekonomian |
| 14. | Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. | 27. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi. | Bag. Kesra |
| | | 28. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. | Bag. Kesra |
| 15. | Program pengembangan wawasan kebangsaan. | 29. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. | Bag. Kesra |
| 16. | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. | 30. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | Bag. Kesra |
| | | 31. Fasilitasi petugas pendamping haji daerah dan jama'ah haji dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | Bag. Kesra |
| 17. | Program pelayanan administrasi perkantoran. | 32. Penyediaan jasa surat menyurat. | Bag. Umum |
| | | 33. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | Bag. Umum |
| | | 34. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. | Bag. Umum |
| | | 35. Penyediaan jasa administrasi keuangan. | Bag. Umum |
| | | 36. Penyediaan jasa kebersihan kantor. | Bag. Umum |
| | | 37. Penyediaan alat tulis kantor. | Bag. Umum |
| | | 38. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | Bag. Umum |
| | | 39. Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor. | Bag. Umum |
| | | 40. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | Bag. Umum |
| | | 41. Penyediaan peralatan rumah tangga. | Bag. Umum |
| | | 42. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. | Bag. Umum |
| | | 43. Penyediaan bahan logistik kantor. | Bag. Umum |
| | | 44. Penyediaan makanan dan minuman. | Bag. Umum |
| | | 45. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah. | Bag. Umum |
| | | 46. Penyediaan jasa keamanan. | Bag. Umum |
| 47. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS. | Bag. Umum | | |
| 18. | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. | 48. Pembangunan gedung kantor. | Bag. Umum |
| | | 49. Pengadaan mobil jabatan | Bag. Umum |
| | | 50. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. | Bag. Umum |
| | | 51. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas. | Bag. Umum |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|---|--|------------------|
| | | 52. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. | Bag. Umum |
| | | 53. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas. | Bag. Umum |
| | | 54. Pengadaan perlatan gedung kantor. | Bag. Umum |
| | | 55. Pengadaan mebelair. | Bag. Umum |
| | | 56. Pengadaan komputer dan perlengkapannya. | Bag. Umum |
| | | 57. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan. | Bag. Umum |
| | | 58. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. | Bag. Umum |
| | | 59. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor. | Bag. Umum |
| | | 60. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. | Bag. Umum |
| | | 61. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional. | Bag. Umum |
| | | 62. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas. | Bag. Umum |
| | | 63. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. | Bag. Umum |
| | | 64. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas. | Bag. Umum |
| | | 65. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/ kantor. | Bag. Umum |
| | | 66. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. | Bag. Umum |
| 19. | Program peningkatan disiplin aparatur. | 67. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. | Bag. Umum |
| | | 68. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. | Bag. Umum |
| | | 69. Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas. | Bag. Organisasi |
| 20. | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. | 70. Sosialisasi peraturan perundang – undangan. | Bag. Umum |
| | | 71. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan. | Bag. Umum |
| | | 72. Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD. | Bag. Pembangunan |
| | | 73. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi. | Bag. PPRB |
| 21. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | 74. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisarrealisasi kinerja SKPD (TAPKIN). | Bag. Pembangunan |
| | | 75. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. | Bag. Umum |
| | | 76. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. | Bag. Umum |
| | | 77. Monitoring evaluasi dan pelaporan. | Bag. Pembangunan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|---|--|------------------|
| | | 78. Pengendalian pelaksanaan hasil-hasil pembangunan. | Bag. Pembangunan |
| | | 79. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. | Bag. Tapem |
| | | 80. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). | Bag. PPRB |
| | | 81. Penyusunan memori serah terima jabatan Bupati /Wakil Bupati. | Bag. Tapem |
| 22. | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD. | 82. Penyusunan database perencanaan SKPD. | Bag. Pembangunan |
| | | 83. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. | Bag. Umum |
| | | 84. Penyusunan database pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten. | Bag. Pembangunan |
| 23. | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. | 85. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. | Bag. Umum |
| | | 86. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri. | Bag. Umum |
| | | 87. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah. | Bag. Tapem |
| | | 88. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah. | Bag. Umum |
| | | 89. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. | Bag. Umum |
| | | 90. Penyelenggaraan protokoler kepala daerah. | Bag. Umum |
| | | 91. Penyusunan materi sambutan kepala daerah / wakil kepala daerah. | Bag. Tapem |
| | | 92. Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum. | Bag. Tapem |
| | | 93. Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya. | Bag. Tapem |
| | | 94. Fasilitasi pelaksanaan pameran bidang pemerintahan. | Bag. Tapem |
| | | 95. Penyusunan telaahan Bupati oleh Staf Ahli | Bag. Umum |
| 24. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. | 96. Penyusunan analisa standar belanja. | Bag. Pembangunan |
| | | 97. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. | Bag. Pembangunan |
| | | 98. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. | Bag. Umum |
| | | 99. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah. | Bag. Umum |
| | | 100. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. | Bag. Umum |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|--|--|-------------------|
| | | 101. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD. | Bag. Perekonomian |
| | | 102. Peningkatan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. | Bag. Perekonomian |
| | | 103. Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT. | Bag. Perekonomian |
| | | 104. Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian. | Bag. Perekonomian |
| | | 105. Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis. | Bag. Perekonomian |
| 25. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota. | 106. Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. | Bag. Pembangunan |
| 26. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | 107. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/ kelurahan | Bag. Tapem |
| 27. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. | 108. Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. | Bag. Pembangunan |
| | | 109. Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara elektronik. | Bag. Organisasi |
| 28. | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. | 110. Pembentukan unit bantuan hukum. | Bag. Hukum |
| | | 111. Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan. | Bag. Tapem |
| | | 112. Fasilitasi Penanganan pengaduan masyarakat. | Bag. Hukum |
| | | 113. Koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya alam. | Bag. Perekonomian |
| | | 114. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan. | Bag. Perekonomian |
| 29. | Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. | 115. Forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah. | Bag. PPRB |
| | | 116. Fasilitasi kerjasama antar daerah. | Bag. Tapem |
| | | 117. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah. | Bag. Tapem |
| | | 118. Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama daerah. | Bag. Tapem |
| | | 119. Penggalan / kajian potensi kerjasama daerah. | Bag. Tapem |
| | | 120. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan. | Bag. Tapem |
| | | 121. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. | Bag. Tapem |
| | | 122. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah. | Bag. Tapem |
| | | 123. Fasilitasi / pembentukan kerjasama daerah. | Bag. Tapem |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|---|--|-----------------|
| 30. | Program penataan peraturan perundang-undangan. | 124. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan. | Bag. Hukum |
| | | 125. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. | Bag. Hukum |
| | | 126. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. | Bag. Hukum |
| | | 127. Publikasi peraturan perundang-undangan. | Bag. Hukum |
| | | 128. Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah. | Bag. Organisasi |
| | | 129. Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK). | Bag. Organisasi |
| | | 130. Fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat desa/ kelurahan. | Bag. Tapem |
| | | 131. Penyuluhan peraturan perundang-undangan. | Bag. Hukum |
| | | 132. Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah. | Bag. Organisasi |
| | | 133. Sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah. | Bag. Hukum |
| | | 134. Fasilitasi keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum. | Bag. Hukum |
| | | 135. Fasilitasi pemenuhan HAM. | Bag. Hukum |
| | | 136. Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa. | Bag. Hukum |
| 31. | Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. | 137. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. | Bag. Tapem |
| | | 138. Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro. | Bag. Kesra |
| | | 139. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan. | Bag. Kesra |
| | | 140. Fasilitasi kegiatan keagamaan. | Bag. Kesra |
| | | 141. Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompimda. | Bag. Kesra |
| | | 142. Fasilitasi kegiatan ibadah haji. | Bag. Kesra |
| | | 143. Penyusunan database lembaga keagamaan formal dan non formal. | Bag. Kesra |
| | | 144. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan. | Bag. Kesra |
| | | 145. Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan. | Bag. Kesra |
| | | 146. Fasilitasi bansos/ hibah keagamaan. | Bag. Kesra |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|---|---|------------------|
| | | 147. Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 148. Sosialisasi kebijakan dibidang sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 149. Penyusunan database lembaga sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 150. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 151. Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 152. Fasilitasi bansos/ hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 153. Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/ hibah lembaga sosial kemasyarakatan. | Bag. Kesra |
| | | 154. Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. | Bag. Kesra |
| | | 155. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK. | Bag. Kesra |
| | | 156. Pembinaan eks. Psikotik. | Bag. Kesra |
| | | 157. Penyusunan, penataan dan evaluasi database kemiskinan. | Bag. Kesra |
| | | 158. Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. | Bag. Kesra |
| | | 159. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. | Bag. Kesra |
| 32. | Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. | 160. Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan. | Bag. Tapem |
| | | 161. Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). | Bag. Tapem |
| | | 162. Penyusunan buku data monografi kecamatan. | Bag. Tapem |
| | | 163. Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan. | Bag. Tapem |
| | | 164. Penyusunan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. | Bag. Tapem |
| | | 165. Rapat koordinasi forum kecamatan. | Bag. Tapem |
| 33. | Program pembinaan dan pengembangan aparatur. | 166. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. | Bag. PPRB |
| | | 167. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS. | Bag. Organisasi |
| | | 168. Fasilitasi urusan kepegawaian. | Bag. PPRB |
| | | 169. Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/ jasa pemerintah. | Bag. Pembangunan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|---|---|-------------------|
| 34. | Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. | 170. Pembinaan dan monitoring reformasi birokrasi. | Bag. PPRB |
| | | 171. Penyusunan sistem dan prosedur kerja. | Bag. Organisasi |
| | | 172. Penerapan sistem e-Government | Bag. Organsasi |
| | | 173. Penyusunan sistem dan prosedur kerja di SKPD. | Bag. Pembangunan |
| 35. | Program pelayanan publik. | 174. Standar pelayanan minimal. | Bag. Organisasi |
| | | 175. Pembinaan lembaga pelayanan publik. | Bag. PPRB |
| | | 176. Fasilitasi survei kepuasan masyarakat. | Bag. PPRB |
| | | 177. Fasilitasi inovasi pelayanan publik. | Bag. PPRB |
| 36. | Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). | 178. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian. | Bag. Perekonomian |
| 37. | Program pengendalian harga dan inflasi daerah. | 179. Koordinasi pemantauan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat | Bag. Perekonomian |
| | | 180. Koordinasi pemantauan pengendalian inflasi daerah (PPID). | Bag. Perekonomian |
| | | 181. Koordinasi ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah. | Bag. Perekonomian |
| 38. | Program pengembangan wilayah perbatasan. | 182. Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi. | Bag. Tapem |
| 39. | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. | 183. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. | Bag. Perekonomian |
| 40. | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. | 184. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa | Bag. Tapem |
| 41. | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. | 185. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. | Bag. Keuangan |
| 42. | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. | 186. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. | Bag. Umum |
| | | 187. Pengadaan alat studio dan komunikasi. | Bag. Humas |
| | | 188. Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi | Bag. Humas |
| | | 189. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika | Bag. Umum |
| 43. | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. | 190. Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking. | Bag. Humas |
| | | 191. Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah Kabupaten Pematang. | Bag. Humas |
| 44. | Program kerjasama informasi dengan mas media. | 192. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. | Bag. Humas |
| | | 193. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Bag. Humas |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | BAGIAN |
|-----|--|--|------------|
| 45. | Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah. | 194. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah. | Bag. Humas |
| 46. | Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika. | 195. Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD. | Bag. Humas |
| | | 196. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial). | Bag. Humas |
| | | 197. Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi. | Bag. Humas |
| | | 198. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah. | Bag. Humas |
| | | 199. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat. | Bag. Humas |

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program merupakan penjabaran lebih rinci tentang apa yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi/kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hubungannya dengan kegiatan, program merupakan kumpulan dari satu atau lebih kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 – 2021 diharapkan mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan aktivitas yang merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, pada tahun 2016-2021 telah menetapkan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Pada Tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat
Daerah Kabupaten Pematang
Tahun 2016 – 2021
dalam ribuan**

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--|---|--------------------------------|---|---|--|------------|---------|------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1. | Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif. | | | Indeks Reformasi Birokrasi. | Na | Na. | 27.926.306 | Na. | 27.351.219 | 56,35 | 27.857.563 | 60,00 | 27.296.746 | 62,00 | 31.974.135 | 65,00 | 33.057.395 | Setda | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintah daerah. | | Nilai LPPD yang diperoleh. | 2,9 | 2,9 | 3.164.201 | 2,9 | 3.141.213 | 3,0 | 3.488.038 | 3,0 | 4.350.500 | 3,1 | 5.299.500 | 3,1 | 5.592.000 | Bag. PPRB Bag. Tapem Bag. Adpem Bag. Umum | |
| | | | 4 08 21 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. | Jumlah Mou Kerjasama antar daerah. | 3 unit | 3 unit | 106.800 | 3 unit | 235.635 | 3 unit | 1.026.703 | 3 unit | 1.018.500 | 3 unit | 1.307.500 | 3 unit | 1.540.000 | Bag. PPRB Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 05 | Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah | Jumlah peserta FGD terkait pendayagunaan aparatur daerah. | 60 peserta | 60 peserta | 31.800 | 60 peserta | 135.635 | 60 peserta | 151.703 | 60 peserta | 166.000 | 60 peserta | 300.000 | 60 peserta | 300.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 08 21 06 | Fasilitasi kerjasama antar daerah. | Jumlah data laporan kerjasama daerah yang tersusun | 1 data | 1 data | 75.000 | 1 data | 100.000 | 1 data | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 07 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah. | Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah. | - | - | 0 | - | 0 | 1 kali | 75.000 | 1 kali | 82.500 | 1 kali | 97.500 | 1 kali | 120.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 08 | Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama daerah. | Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah | - | - | 0 | - | 0 | 1 raperbup / raperda | 50.000 | 1 raperbup / raperda | 55.000 | 1 raperbup / raperda | 65.000 | 1 raperbup / raperda | 80.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 09 | Penggalan / kajian potensi kerjasama daerah. | Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun. | - | - | 0 | - | 0 | 1 laporan | 150.000 | 1 laporan | 165.000 | 1 laporan | 195.000 | 1 laporan | 240.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 10 | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan. | Jumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan. | - | - | 0 | - | 0 | 1 kali | 100.000 | 4 kali | 110.000 | 5 kali | 130.000 | 6 kali | 160.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 21 11 | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. | Jumlah koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah yang dilakukan. | - | - | 0 | - | 0 | 1 kali | 100.000 | 1 kali | 110.000 | 1 kali | 130.000 | 1 kali | 160.000 | Bag. Tapem |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|---|--|--|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 21 | 12 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenal kerjasama daerah. | Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenal kerjasama daerah. | - | - | 0 | - | 0 | 1 kali | 50.000 | 1 kali | 55.000 | 1 kali | 65.000 | 1 kali | 80.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 21 | 13 | Fasilitasi / pembentukan kerjasama daerah. | Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah. | - | - | 0 | - | 0 | 30 dokumen | 250.000 | 10 dokumen | 275.000 | 40 dokumen | 325.000 | 50 dokumen | 400.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | | Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. | Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. | 100 % | 100 % | 110.000 | 100 % | 275.000 | 100 % | 275.000 | 100 % | 300.000 | 100 % | 545.000 | 100 % | 600.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 01 | Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan. | Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina. | 14 kecamatan | 14 kecamatan | 110.000 | 14 kecamatan | 100.000 | 14 kecamatan | 120.000 | 14 kecamatan | 225.000 | 14 kecamatan | 160.000 | 14 kecamatan | 175.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 07 | Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). | Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang. | - | - | 0 | 4 laporan | 100.000 | 4 laporan | 80.000 | - | 0 | 4 laporan | 80.000 | 4 laporan | 90.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 08 | Penyusunan buku data monografi kecamatan. | Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester. | - | - | 0 | 28 laporan | 75.000 | 28 laporan | 75.000 | 28 laporan | 75.000 | 28 laporan | 80.000 | 28 laporan | 85.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 09 | Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan. | Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 kegiatan | 75.000 | 1 kegiatan | 75.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 10 | Penyusunan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. | Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 peraturan | 50.000 | 1 peraturan | 50.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 24 | 11 | Rapat koordinasi forum kecamatan. | Jumlah rakor forum kecamatan yang terselenggara | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 kegiatan | 100.000 | 1 | 125.000 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 06 | 15 | | Program pengembangan data/informasi. | Persentase perkembangan data/informasi | 100 % | 100 % | 148.775 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem Bag. Tapem |
| | | | 1 | 06 | 15 | 02 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. | Jumlah kegiatan Fasilitasi upload data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Website Portal Pengadaan. | 2 kali | 2 kali | 60.775 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 1 | 06 | 15 | 08 | Penyusunan buku data monografi kecamatan. | Jumlah buku data monografi kecamatan dan pengadaan papan data monografi. | 20 buku | 20 buku | 43.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 06 | 15 | 09 | Sistem informasi manajemen pemerintahan desa (SIMPEMDES). | Jumlah buku data aparatur pemerintah desa dan buku profil BPD. | 42 buku | 42 buku | 45.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|--|--|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | 1 | 09 | 17 | | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. | Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan. | 100 % | 100 % | 690.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 09 | 17 | 01 | Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang pertanahan. | Penyelesaian TMKH untuk fasilitas Pemerintah kecamatan & pemukiman Warga, 1 BA Kesepakatan/ Rekomendasi teknis untuk pelaksanaan TMKH, Ijin Prinsip, BATM, Tatabatas, Pelepasan hak. | 1 dokumen | 1 dokumen | 590.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 09 | 17 | 02 | Rapat koordinasi di bidang pertanahan. | Jumlah fasilitasi rakor permasalahan dibidang pertanahan dan Bintek Administrasi Pertanahan Desa / Kelurahan. | 12 bulan | 12 bulan | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 20 | 19 | | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | 100 % | 100 % | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 20 | 19 | 04 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan. | Jumlah pembinaan kelurahan bintek administrasi kelurahan. | 1 kali | 1 kali | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 22 | 18 | | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. | Persentase meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa. | 100 % | 100 % | 95.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 22 | 18 | 07 | Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. | Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan monev LPPDesa, Bintek Pelaksanaan evaluasi LPPDesa dan Penghargaan Camat pembina terbaik. | 14 Kecamatan | 14 Kecamatan | 95.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. | Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH. | 100 % | 100 % | 1.799.626 | 100 % | 2.530.328 | 100 % | 2.101.335 | 100 % | 2.932.000 | 100 % | 3.297.000 | 100 % | 3.402.000 | Bag. Umum Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan. | Persentase terlaksananya dialog/ audiensi | 100 % | 100 % | 218.066 | 100 % | 196.496 | 100 % | 170.000 | 100 % | 220.000 | 100 % | 220.000 | 100 % | 220.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 15 | 02 | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri. | Rata - rata penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen / luar negeri | 100 % | 100 % | 213.160 | 100 % | 174.285 | 100 % | 173.585 | 100 % | 280.000 | 100 % | 280.000 | 100 % | 280.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 15 | 04 | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah | 6 kali | 6 kali | 355.000 | 6 kali | 245.750 | 6 kali | 245.750 | 6 kali | 300.000 | 6 kali | 350.000 | 6 kali | 375.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 05 | Kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah. | Persentase kecamatan yang mendapat kunjungan kerja / inspeksi KDH/ WKDH | 100 % | 100 % | 151.600 | 100 % | 130.800 | 100 % | 144.500 | 100 % | 145.000 | 100 % | 170.000 | 100 % | 170.000 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--|----|----|----|---|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 15 | 06 | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. | Persentase pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. | 100 % | 100 % | 611.800 | 100 % | 1.233.000 | 100 % | 1.067.500 | 100 % | 1.317.000 | 100 % | 1.317.000 | 100 % | 1.317.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 15 | 09 | Penyelenggaraan protokoler kepala daerah. | Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan protokoler. | 100 % | 100 % | 201.000 | 100 % | 469.997 | 100 % | 200.000 | 100 % | 350.000 | 100 % | 350.000 | 100 % | 350.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 15 | 10 | Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. | Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/Sekda. | 220 naskah | 220 naskah | 49.000 | 200 naskah | 80.000 | 250 naskah | 100.000 | 280 naskah | 120.000 | 300 naskah | 130.000 | 330 naskah | 140.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 54 | Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum. | Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 150.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 55 | Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pemalang. | Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pemalang yang terfasilitasi | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 kegiatan | 30.000 | 1 kegiatan | 50.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 56 | Fasilitasi pelaksanaan pameran bidang pemerintahan. | Jumlah pelaksanaan pameran bidang pemerintahan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 kegiatan | 150.000 | 1 kegiatan | 150.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 15 | 57 | Penyusunan telaahan Bupati oleh Staf Ahli. | Persentase Telaahan Bupati oleh staf Ahli yang tersusun dalam 1 tahun | - | - | 0 | - | 0 | 100% | 200.000 | 100% | 200.000 | 100% | 200.000 | 100% | 200.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 30 | | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. | Persentase ketersediaan informasi rupa bumi dari masing-masing wilayah perbatasan. | 100 % | 100 % | 114.000 | 100% | 100.250 | 100% | 85.000 | 100% | 100.000 | 100% | 150.000 | 100 % | 250.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 30 | 08 | Fasiltasi pembakuan nama rupa bumi. | Terpeliharanya pilar batas daerah. | 70 pilar | 70 pilar | 114.000 | 70 pilar | 100.250 | 70 pilar | 85.000 | 70 pilar | 100.000 | 70 pilar | 150.000 | 70 pilar | 250.000 | Bag. Tapem |
| | | | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. | | | | | Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh. | (50) C | (50) C | 1.486.539 | (55) CC | 1.987.623 | (60) CC | 2.155.449 | (62) B | 1.810.887 | (63) B | 2.230.300 | (64) B | 2.661.000 | Bag. Tapem Bag. Pemb. Bag. Umum Bag. PPRB Bag. Org. |
| | | | | | | | | Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen laporan kinerja yang diperoleh. | 9 | 9 | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 1 | 06 | 21 | | Program perencanaan pembangunan daerah. | Prosentase Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah. | 100 % | 100 % | 464.540 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem Bag. Adpem |
| | | | 1 | 06 | 21 | 12 | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). | Jumlah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang. | 20 buku | 20 buku | 205.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 1 | 06 | 21 | 13 | Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. | Jumlah buku data laporan capaian kinerja PD Triwulan I, II, III dan IV, | 4 buku | 4 buku | 259.540 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 4 | 08 | 06 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun | 100 % | 100 % | 297.555 | 100 % | 1.057.587 | 100 % | 877.250 | 100 % | 873.337 | 100 % | 1.191.000 | 100 % | 1.506.000 | Bag. Pemb. Bag. Umum Bag. Tapem Bag. PPRB |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|--|--|--|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | 4 08 06 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN). | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Setda yang disusun. | 1 dokumen | 1 dokumen | 266.700 | 1 dokumen. | 44.000 | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 76.000 | 1 dokumen | 100.000 | 1 dokumen | 120.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 08 06 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. | 1 dokumen | 1 dokumen | 12.000 | 1 dokumen. | 8.260. | 1 dokumen | 13.270 | 1 dokumen | 18.000 | 1 dokumen | 18.000 | 1 dokumen | 18.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 06 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Setda. | 1 dokumen | 1 dokumen | 18.855 | 1 dokumen | 21.682 | 1 dokumen | 22.400 | 1 dokumen | 27.537 | 1 dokumen | 31.000 | 1 dokumen | 31.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 06 09 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. | Jumlah buku data laporan capaian kinerja PD Triwulan I, II, III dan IV, | - | - | 0 | 4 buku | 230.000 | 4 buku | 170.000 | 4 buku | 90.000 | 4 buku | 250.000 | 4 buku | 265.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 08 06 11 | Pengendalian Pelaksanaan Hasil - hasil Pembangunan. | Jumlah laporan hasil-hasil pembangunan. | - | - | 0 | 1 laporan | 220.000 | 1 laporan | 146.000 | 1 laporan | 90.000 | 1 laporan | 250.000 | 1 laporan | 260.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 08 06 12 | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. | Jumlah dokumen LPPD Kabupaten Pematang Jaya yang tersusun dan publikasi ILPPD. | - | - | 0 | 1 dokumen | 245.750 | 1 dokumen | 245.750 | 1 dokumen | 245.750 | 1 dokumen | 280.000 | 1 dokumen | 300.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 06 13 | Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemda yang disusun. | - | - | 0 | 1 dokumen | 296.155 | 1 dokumen | 229.830 | 1 dokumen | 326.050 | 1 dokumen | 262.000 | 1 dokumen | 262.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 08 06 15 | Penyusunan memori serah terima jabatan Bupati /Wakil Bupati yang tersusun | Jumlah dokumen memori serah terima jabatan Bupati/Wakil Bupati yang tersusun | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 dokumen | 250.000 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 09 | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD. | Persentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia. | 100 % | 100 % | 159.224 | 100 % | 363.000 | 100 % | 350.000 | 100 % | 300.000 | 100 % | 360.000 | 100 % | 390.000 | Bag. Pemb. Bag. Umum |
| | | | 4 08 09 01 | Penyusunan data base perencanaan SKPD. | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia renstra dan renja. | 1 dokumen | 1 dokumen | 159.224 | 2 dokumen. | 50.000 | 2 dokumen | 49.000 | 2 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 60.000 | 1 dokumen | 80.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 08 09 02 | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun. | - | - | 0 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 09 03 | Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten. | Jumlah kegiatan fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan | - | - | 0 | 2 kali | 163.000 | 2 kali | 151.000 | 2 kali | 100.000 | 2 kali | 150.000 | 2 kali | 160.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 08 05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. | Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi | - | - | 0 | 100 % | 153.700 | 100 % | 482.312 | 100 % | 267.550 | 100 % | 274.300 | 100 % | 335.000 | Bag. Umum Bag. Pemb. Bag. PPBR |
| | | | 4 08 05 02 | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. | - | - | 0 | - | 0 | 100 % | 125.000 | 100 % | 129.600 | 100 % | 54.300 | 100 % | 60.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 05 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek / pelatihan. | - | - | 0 | - | 0 | 24 peserta | 198.912 | 12 peserta | 72.950 | 24 peserta | 100.000 | 24 peserta | 130.000 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|---|----|----|----|---|---|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 05 | 04 | Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD. | Jumlah ASN dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti Seminar/Workshop. | - | - | 0 | 16 orang | 80.000 | 16 orang | 90.000 | 16 orang | 50.000 | 16 orang | 100.000 | 16 orang | 120.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 | 08 | 05 | 05 | Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi. | Jumlah peserta yang mengikuti seminar, workshop. | - | - | 0 | 12 peserta | 73.700 | 10 peserta | 68.400 | 4 peserta | 15.000 | 6 peserta | 20.000 | 8 peserta | 25.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 25 | | Program pembinaan dan pengembangan aparatur. | Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu | 100 % | 100 % | 488.700 | 100 % | 413.336 | 100 % | 445.887 | 100 % | 370.000 | 100 % | 405.000 | 100 % | 430.000 | Bag. Org. Bag. PPBR Bag. Pemb. |
| | | | 4 | 08 | 25 | 05 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. | Jumlah dokumen sistem informasi dan urusan kepegawaian yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 135.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Organisasi |
| | | | 4 | 08 | 25 | 06 | Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS. | Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial, evaluasi analisis jabatan struktural, evaluasi jabatan fungsional umum yang tersusun. | 1 dokumen | 1 dokumen | 276.200 | 1 dokumen | 261.900 | 1 dokumen | 300.000 | 1 dokumen | 300.000 | 1 dokumen | 300.000 | 1 dokumen | 300.000 | Bag. Organisasi |
| | | | 4 | 08 | 25 | 21 | Fasilitasi urusan kepegawaian. | Persentase urusan kepegawaian yang tertangani. Jumlah dokumen profil kepegawaian setda yang tersusun. | 100 % | 100 % | 77.500 | 100 % | 71.436 | 100 % | 70.887 | 100 % | 20.000 | 100 % | 25.000 | 100 % | 30.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 25 | 28 | Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah. | Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun angka kreditnya | - | - | 0 | 10 orang | 80.000 | 10 orang | 75.000 | 10 orang | 50.000 | 10 orang | 80.000 | 10 orang | 100.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 1 | 24 | 16 | | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. | Persentase Meningkatnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 100 % | 100 % | 76.520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bagian Keuangan. |
| | | | 1 | 24 | 16 | 02 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. | Persentase dokumen/arsip keuangan di lingkungan Setda yang terdata dan tertata. | 100 % | 100 % | 76.520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bagian Keuangan. |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | | | | Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan public. | 77,00 | 76,00 | 13.854.430 | 75,31 | 13.644.750 | 78,00 | 12.592.261 | 80,00 | 12.031.546 | 82,00 | 13.380.490 | 82,00 | 13.475.550 | Bag. Umum Bag. PPRB Bag. Org. Bag. Pemb. | |
| | | | 4 | 08 | 01 | | Program pelayanan administrasi perkantoran. | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran. | 100 % | 100 % | 5.187.089 | 100 % | 7.357.875 | 100 % | 7.375.399 | 100 % | 6.499.645 | 100 % | 8.183.500 | 100 % | 8.233.560 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat-menyerat. | Persentase pemenuhan jasa surat menyerat | 100 % | 100 % | 136.124 | 100 % | 283.604 | 100 % | 300.300 | 100 % | 277.600 | 100 % | 330.000 | 100 % | 330.000 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|--|---|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | 4 08 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100 % | 100 % | 975.000 | 100 % | 1.056.478 | 100 % | 1.023.200 | 100 % | 1.045.250 | 100 % | 1.100.000 | 100 % | 1.100.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. | Persentase kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan. | 100 % | 100 % | 98.975 | 100 % | 233.331 | 100 % | 294.475 | 100 % | 288.600 | 100 % | 350.000 | 100 % | 350.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan. | Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan dilingkungan setda. | 100 % | 100 % | 149.100 | 100 % | 107.545 | 100 % | 124.870 | 100 % | 161.927 | 100 % | 165.000 | 100 % | 165.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor. | Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor. | 100 % | 100 % | 453.860 | 100 % | 431.090 | 100 % | 558.825 | 100 % | 612.450 | 100 % | 650.000 | 100 % | 700.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor. | Persentase pemenuhan alat tulis kantor di lingkungan Setda | 100 % | 100 % | 84.000 | 100 % | 79.329 | 100 % | 79.329 | 100 % | 65.100 | 100 % | 70.000 | 100 % | 70.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. | 100 % | 100 % | 145.590 | 100 % | 171.365 | 100 % | 171.365 | 100 % | 121.520 | 100 % | 125.000 | 100 % | 125.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. | 100 % | 100 % | 173.270 | 100 % | 609.790 | 100 % | 171.365 | 100 % | 140.000 | 100 % | 300.000 | 100 % | 300.060 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | 100 % | 100 % | 315.645 | 100 % | 330.706 | 100 % | 430.000 | 100 % | 500.000 | 100 % | 500.000 | 100 % | 500.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga. | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 100 % | 100 % | 31.800 | 100 % | 30.307 | 100 % | 40.000 | 100 % | 49.455 | 100 % | 50.000 | 100 % | 50.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. | Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan. | 100 % | 100 % | 102.000 | 100 % | 91.000 | 100 % | 114.000 | 100 % | 114.400 | 100 % | 115.000 | 100 % | 115.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 16 | Penyediaan bahan logistik kantor. | Jumlah logistik kantor yang disediakan | 100 % | 100 % | 37.450 | 100 % | 36.600 | 100 % | 36.600 | 100 % | 36.600 | 100 % | 40.000 | 100 % | 40.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 17 | Penyediaan makanan dan minuman. | Persentase penyediaan makanan dan minuman | 100 % | 100 % | 1.282.250 | 100 % | 1.374.644 | 100 % | 1.375.000 | 100 % | 1.354.400 | 100 % | 1.400.000 | 100 % | 1.400.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah. | Persentase pelaksanaan rakor dan konsultasi didalam dan keluar daerah. | 100 % | 100 % | 1.069.170 | 100 % | 2.132.007 | 100 % | 2.222.925 | 100 % | 1.199.562 | 100 % | 2.400.000 | 100 % | 2.400.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 19 | Penyediaan jasa keamanan. | Persentase pemenuhan jasa keamanan | 100 % | 100 % | 55.455 | 100 % | 292.129 | 100 % | 344.595 | 100 % | 478.506 | 100 % | 500.000 | 100 % | 500.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 01 26 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS. | Jumlah jenis layanan jasa kesehatan KDH /WKDH dan keluarga. | 100 % | 100 % | 77.400 | 100 % | 97.950 | 100 % | 88.550 | 100 % | 54.275 | 100 % | 88.500 | 100 % | 88.500 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran aparatur. | 100 % | 100 % | 4.341.593 | 100 % | 5.617.135 | 100 % | 4.201.055 | 100 % | 4.471.901 | 100 % | 4.121.990 | 100 % | 4.071.990 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|--|--|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | 4 08 02 03 | Pembangunan gedung kantor. | Jumlah gedung yang dibangun. | - | - | 0 | 100 % | 300.000 | - | 0 | - | 0 | 100 % | 200.000 | 100 % | 200.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 04 | Pengadaan mobil jabatan | Jumlah Mobil jabatan yang dibeli. | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional. | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibeli. | - | - | 0 | 100 % | 739.000 | 100 % | 140.000 | 100 % | 121.833 | 100 % | 200.000 | 100 % | 150.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 06 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas. | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipenuhi. | 100 % | 100 % | 423.660 | 100 % | 342.820 | 100 % | 342.820 | 100 % | 352.110 | 100 % | 360.000 | 100 % | 360.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor. | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli. | 100 % | 100 % | 95.510 | 100 % | 352.760 | 100 % | 352.760 | 100 % | 235.850 | 100 % | 350.000 | 100 % | 350.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 08 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas. | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli. | 100 % | 100 % | 244.550 | 100 % | 187.700 | 100 % | 108.900 | 100 % | 883.050 | 100 % | 200.000 | 100 % | 200.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor. | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli. | 100 % | 100 % | 374.750 | 100 % | 242.750 | 100 % | 195.900 | 100 % | 265.318 | 100 % | 200.000 | 100 % | 200.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 10 | Pengadaan mebelair. | Jumlah mebelair yang dibeli. | 100 % | 100 % | 86.350 | 100 % | 116.400 | 100 % | 79.300 | 100 % | 76.750 | 100 % | 75.000 | 100 % | 75.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 11 | Pengadaan komputer dan perlengkapannya. | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli. | 100 % | 100 % | 244.130 | 100 % | 505.070 | 100 % | 156.175 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatn. | 100 % | 100 % | 530.340 | 100 % | 200.000 | 100 % | 384.000 | 100 % | 384.000 | 100 % | 384.000 | 100 % | 384.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. | 100 % | 100 % | 69.000 | 100 % | 120.000 | 100 % | 160.000 | 100 % | 160.000 | 100 % | 160.000 | 100 % | 160.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. | Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. | 100 % | 100 % | 714.300 | 100 % | 889.860 | 100 % | 650.000 | 100 % | 544.000 | 100 % | 544.000 | 100 % | 544.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. | Persentase pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan. | 100 % | 100 % | 257.400 | 100 % | 239.965 | 100 % | 217.000 | 100 % | 225.000 | 100 % | 225.000 | 100 % | 225.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional. | 100 % | 100 % | 815.103 | 100 % | 886.385 | 100 % | 930.000 | 100 % | 582.990 | 100 % | 582.990 | 100 % | 582.990 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 25 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas. | Persentase perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan. | 100 % | 100 % | 114.000 | 100 % | 90.000 | 100 % | 120.200 | 100 % | 125.000 | 100 % | 125.000 | 100 % | 125.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. | Persentase perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan. | 100 % | 100 % | 100.500 | 100 % | 119.925 | 100 % | 28.000 | 100 % | 60.000 | 100 % | 60.000 | 100 % | 60.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 08 02 27 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas. | Persentase peralatan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaannya secara rutin/ berkala. | 100 % | 100 % | 66.000 | 100 % | 56.000 | 100 % | 56.000 | 100 % | 75.000 | 100 % | 75.000 | 100 % | 75.000 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|---|--|---|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|-------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. | Persentase peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin/ berkala. | 100 % | 100 % | 121.000 | 100 % | 137.500 | 100 % | 140.000 | 100 % | 165.000 | 100 % | 165.000 | 100 % | 165.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 02 | 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. | Persentase mebelair yang dilakukan pemeliharaannya secara rutin/ berkala. | 100 % | 100 % | 85.000 | 100 % | 91.000 | 100 % | 140.000 | 100 % | 66.000 | 100 % | 66.000 | 100 % | 66.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 26 | | Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. | Jumlah regulasi birokrasi yang disusun. | 2 dokumen | 2 dokumen | 324.200 | 2 dokumen | 337.480 | 2 dokumen | 488.809 | 2 dokumen | 535.000 | 2 dokumen | 535.000 | 2 dokumen | 585.000 | Bag. PPRB Bag. Org. Bag. Pemb. |
| | | | 4 | 08 | 26 | 01 | Pembinaan dan monitoring reformasi birokrasi. | Jumlah kelompok budaya kerja yang terbentuk. Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. | 0 kelompok 3 unit kerja 0 peserta | 0 kelompok 3 unit kerja 0 peserta | 162.900 | 0 kelompok 4 unit kerja 60 peserta | 240.680 | 0 kelompok 5 unit kerja 60 peserta | 363.809 | 20 kelompok 7 unit kerja 60 peserta | 395.000 | 23 kelompok 7 unit kerja 60 peserta | 400.000 | 27 kelompok 10 unit kerja 60 peserta | 410.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 26 | 02 | Penyusunan sistem dan prosedur kerja. | Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD. | 1 laporan | 1 laporan | 42.800 | 1 laporan | 56.800 | 1 laporan | 80.000 | 1 laporan | 100.000 | 1 laporan | 75.000 | 1 laporan | 100.000 | Bag. Organisasi. |
| | | | 1 | 20 | 34 | 03 | Penerapan sistem e-Government. | Persentase terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan melalui sistem aplikasi | 100 % | 100 % | 118.500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Organisasi. |
| | | | 4 | 08 | 26 | 04 | Penyusunan sistem dan prosedur kerja di SKPD. | Jumlah dokumen SOP yang disusun. | - | - | 0 | 1 dokumen. | 40.000 | 1 dokumen. | 45.000 | 1 dokumen | 40.000 | 1 dokumen. | 60.000 | 1 dokumen. | 75.000 | Bag. Pemb. |
| | | | 4 | 08 | 27 | | Program pelayanan publik. | Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP. | 100 % | 100 % | 230.900 | 100 % | 332.260 | 100 % | 526.998 | 100 % | 525.000 | 100 % | 540.000 | 100 % | 585.000 | Bag. Org. Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 27 | 01 | Standar pelayanan minimal. | Jumlah laporan evaluasi SPM yang disusun. | 1 laporan | 1 laporan | 53.100 | 2 laporan | 55.550 | 1 laporan | 75.000 | 1 laporan | 80.000 | 1 laporan | 75.000 | 1 laporan | 100.000 | Bagian Organisasi |
| | | | 4 | 08 | 27 | 02 | Pembinaan lembaga pelayanan publik. | Jumlah unit pelayanan publik yang dibina. | 3 unit | 3 unit | 177.800 | 1 unit | 276.710 | 1 unit | 108.534 | 20 unit | 80.000 | 20 unit | 85.000 | 20 unit | 90.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 27 | 03 | Fasilitasi survei kepuasan masyarakat. | Jumlah unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat | - | - | 0 | - | 0 | 1 unit | 253.723 | 5 unit | 165.000 | 6 unit | 170.000 | 7 unit | 175.000 | Bag. PPRB |
| | | | 4 | 08 | 27 | 04 | Fasilitasi inovasi pelayanan publik | Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan. Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya. | - - | - - | 0 | - 6 proposal | 0 | 1 kegiatan 6 proposal | 89.741 | 1 kegiatan 6 proposal | 200.000 | 1 kegiatan 7 proposal | 210.000 | 1 kegiatan 8 proposal | 220.000 | Bag. PPRB |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|---|--|-------------|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-------------------------------------|----|--------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 1 | 25 | 15 | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. | Persentase berkembangnya komunikasi, informasi dan media masa | 100 % | 100 % | 472.148 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Umum Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 15 | 02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. | Persentase terpeliharanya jaringan komunikasi dan persandian. | 100 % | 100 % | 96.048 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Umum |
| | | | 1 | 25 | 15 | 05 | Pengadaan alat studio dan komunikasi. | Jumlah pengadaan perlatan studio, komunikasi dan dokumentasi yang tersedia. | 31 Unit | 31 Unit | 270.500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 15 | 08 | Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi. | Jumlah alat studio dan komunikasi yang mendapat pemeliharaan. | 22 Unit | 22 Unit | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 15 | 09 | Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. | Tersedianya jaringan dan alat komunikasi serta persandian (alphone, telepon, dan PABX) untuk kelancaran operasional Santel di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pematang. | 100 % | 100 % | 55.600 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Umum |
| | | | 1 | 25 | 17 | | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. | Persentase Terfasilitasinya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. | 100 % | 100 % | 261.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 17 | 07 | Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking. | Fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam bidang public speaking. | 160 Orang | 160 Orang | 111.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 17 | 11 | Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pematang. | Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti orintasi keterbukaan informasi. | 240 Orang | 240 Orang | 150.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 18 | | Program kerjasama informasi dengan mas media. | Persentase Berkembangnya kerjasama informasi dengan mas media | 100 % | 100 % | 827.200 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 18 | 01 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. | Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media massa (cetak dan elektronik). | 85 Kegiatan | 85 Kegiatan | 641.700 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 18 | 02 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Jumlah tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah dan tabloid. | 3 Edisi | 3 Edisi | 185.500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |
| | | | 1 | 25 | 19 | | Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah. | Persentase Terwujudnya penguatan kelembagaan pengelolaan komunikasi dan informasi daerah | 100 % | 100 % | 129.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|---|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|---|--|--|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 1 | 25 | 19 | 05 | Revitalisasi pendayagunaan media center daerah. | Terfasilitasinya informasi yang dibutuhkan media massa untuk kepentingan peliputan dan publikasi. | 100 % | 100 % | 129.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | | Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika. | Persentase Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika. | 100 % | 100 % | 2.081.300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | 07 | Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD. | Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang di dokumentasikan dalam bentuk foto,video,buku dll. | 500 kegiatan | 500 kegiatan | 477.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | 08 | Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial). | Jumlah pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial). | 69 iklan | 69 iklan | 532.100 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | 09 | Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi. | Terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi. | 52 dialog | 52 dialog | 737.200 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | 12 | Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah. | Jumlah rakor PPID dan PPID Pembantu, dan terfasilitasinya penyelesaian sengketa informasi. | 7 kali | 7 kali | 135.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| | | | 1 | 25 | 20 | 14 | Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat. | Jumlah kegiatan yang dikelola LPPL Radio swara widuri. | 90 siaran | 90 siaran | 200.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Humas | | |
| 4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. | | | | | | | Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan. | 100 % | 100 % | 905.425 | 100 % | 408.985 | 100 % | 469.660 | 100 % | 453.240 | 100 % | 510.000 | 100 % | 510.000 | Bag. Adpem Bag. Org. Bag. Umum | |
| | | | 4 | 08 | 19 | | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. | Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan. | 100 % | 100 % | 636.805 | 100% | 93.500 | 100% | 120.000 | 100% | 150.000 | 100% | 135.000 | 100% | 135.000 | Bag. Adpem Bag. Org. |
| | | | 1 | 20 | 23 | 03 | Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. | Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kab. Pematang Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. | 12 bulan | 12 bulan | 295.505 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 4 | 08 | 19 | 04 | Fasilitasi pelayanan layanan tata naskah secara elektronik. | Tersedianya layanan TNDE. | 12 bulan | 12 bulan | 341.300 | 12 bulan. | 93.500 | 12 bulan. | 120.000 | 12 bulan. | 150.000 | 12 bulan. | 135.000 | 12 bulan. | 135.000 | Bag. Organisasi |
| | | | 4 | 08 | 03 | | Program peningkatan disiplin aparatur. | Persentase tingkat kedisiplinan ASN. | 100 % | 100 % | 268.620 | 100 % | 315.485 | 100 % | 349.660 | 100 % | 303.240 | 100 % | 375.000 | 100 % | 375.000 | Bag. Umum Bag. Org. |
| | | | 4 | 08 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. | Jumlah pakaian dinas KDH/ WKDH yang dibeli. | 100 % | 100 % | 98.020 | 100 % | 88.435 | 100 % | 93.660 | 100 % | 114.120 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | Bag. Umum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--|----|----|----|--|---|--|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | 4 | 08 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu. | Jumlah jenis pakaian KDH/WKDH yang dibeli. | 100 % | 100 % | 170.600 | 100 % | 171.050 | 100 % | 166.000 | 100 % | 114.120 | 100 % | 150.000 | 100 % | 150.000 | Bag. Umum |
| | | | 4 | 08 | 03 | 06 | Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas. | Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas. | - | - | 0 | 2.000 buah | 56.000 | 1.000 buah | 90.000 | 1.000 buah | 75.000 | 1.000 buah | 75.000 | 1.000 buah | 75.000 | Bag. Organisasi |
| | | | 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama | | | | Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi | 100 % | 100 % | 2.955.000 | 100 % | 2.354.063 | 100 % | 3.300.000 | 100 % | 2.250.000 | 100 % | 3.400.000 | 100 % | 3.400.000 | Bag. Kesra Bag. Perekonomian & SDA Bag. Tapem | |
| | | | 1 | 11 | 15 | | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. | Persentase Terwujudnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. | 100 % | 100 % | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 15 | 06 | Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. | Jumlah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. | 6 kali | 6 kali | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 16 | | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | Persentase Terwujudnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | 100 % | 100 % | 105.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 16 | 01 | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan. | Jumlah kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan. | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 40.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 16 | 05 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 16 | 06 | Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. | Jumlah organisasi jaringan pemerdayaan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. | 15 organisasi | 15 organisasi | 55.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 17 | | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. | Persentase Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. | 100 % | 100 % | 190.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 17 | 08 | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. | Jumlah pelaksanaan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. | 12 bulan | 12 bulan | 40.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 11 | 17 | 10 | Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan. | Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan. | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|---|--|-------------|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-------------------------------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | Target |
| | | | 1 | 11 | 17 | 11 | Fasilitasi Operasional Komisi Penanggulangan AIDS. | Jumlah pelaksanaan fasilitasi operasional komisi penanggulangan AIDS. | 12 bulan | 12 bulan | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 16 | | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. | Persentase Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | 100 % | 100 % | 480.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra Bagi. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 13 | 16 | 07 | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. | Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. | 12 bulan | 12 bulan | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 16 | 09 | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. | Jumlah koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. | 22 kali | 22 kali | 370.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA |
| | | | 1 | 13 | 16 | 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan. | Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan. | 4 kali | 4 kali | 60.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 20 | | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | Persentase Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | 100 % | 100 % | 395.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 20 | 01 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. | Jumlah orang yang mendapat pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. | 50 orang | 50 orang | 60.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 20 | 03 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. | Jumlah orang yang mendapat pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. | 200 orang | 200 orang | 135.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 13 | 20 | 04 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. | Jumlah orang eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan. | 100 orang | 100 orang | 200.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 18 | 20 | | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga. | Persentase Terwujudnya pembinaan dan pemasarakatan olah raga. | 100 % | 100 % | 35.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 | 18 | 20 | 05 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi. | Jumlah kegiatan senam aerobik yang dilaksanakan. | 48 kegiatan | 48 kegiatan | 13.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|--|---|--|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | 1 18 20 07 | Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. | Jumlah kegiatan senam massal yang dilaksanakan. | 48 kegiatan | 48 kegiatan | 22.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 19 17 | Program pengembangan wawasan kebangsaan. | Prosentase Berkembangnya wawasan kebangsaan. | 100 % | 100 % | 170.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 19 17 01 | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. | Jumlah kegiatan pengajian rutin di lingkungan Setda beserta KDH/WKDH dan pengajian bersama PKK. | 30 kegiatan | 30 kegiatan | 170.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 19 18 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. | Prosentase Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 100 % | 100 % | 680.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 19 18 03 | Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 1 19 18 04 | Fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan Jama'ah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. | Jumlah kegiatan fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan Jama'ah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 580.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 4 08 23 | Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan | 100 % | 100 % | 850.000 | 100 % | 2.354.063 | 100 % | 3.300.000 | 100 % | 2.250.000 | 100 % | 3.400.000 | 100 % | 3.400.000 | Bag. Tapem Bag. Kesra. |
| | | | 1 20 28 02 | Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades. | - | 12 desa | 850.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 4 08 23 05 | Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro. | Jumlah kegiatan rakor untuk FKUB dan persiapan tarhim. Jumlah kegiatan tarawih silaturahmi forkompinda | - | - | 0 | 4 kegiatan | 222.050 | 6 kegiatan | 300.000 | 1 kegiatan | 150.000 | 6 kegiatan | 300.000 | 6 kegiatan | 300.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 08 23 06 | Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan. | Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam. | - | - | 0 | 5 kegiatan | 92.000 | 5 kegiatan | 150.000 | 5 kegiatan | 100.000 | 5 kegiatan | 150.000 | 5 kegiatan | 150.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 08 23 07 | Fasilitasi kegiatan keagamaan. | Jumlah kegiatan pengajian rutin dalam upaya pembinaan pegawai oleh KDH/WKDH dan pengajian bersama PKK. Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, Kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi/nasional. | - | - | 0 | 29 kegiatan | 465.850 | 29 kegiatan | 510.000 | 29 kegiatan | 350.000 | 29 kegiatan | 510.000 | 29 kegiatan | 510.000 | Bag. Kesra |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | | | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|---|---|--|----|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 08 | Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompinda. | Jumlah anggota tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah. Jumlah kegiatan pelepasan dan silaturahmi jamaah haji dengan forkompinda. | - | - | 0 | 6 orang | 455.000 | 6 orang | 525.000 | 6 orang | 550.000 | 6 orang | 575.000 | 6 orang | 575.000 | Bag. Kesra | | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 09 | Fasilitasi kegiatan ibadah haji. | Jumlah bus untuk fasilitasi transportasi jamaah haji. Jumlah kegiatan fasilitasi operasional kegiatan jamaah haji non BPIH. | - | - | 0 | 16 bus | 258.073 | 17 bus | 650.000 | 16 bus | 455.000 | 16 bus | 650.000 | 16 bus | 650.000 | 16 bus | 650.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 10 | Penyusunan database lembaga keagamaan formal dan non formal. | Jumlah dokumen database lembaga keagamaan formal dan non formal. | - | - | 0 | 1 dokumen | 30.000 | 1 dokumen | 40.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 11 | Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan. | Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi/ lembaga keagamaan. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 130.000 | 4 kegiatan | 100.000 | - | 0 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 12 | Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan. | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi keagamaan. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 20.000 | 4 kegiatan | 30.000 | - | 0 | 4 kegiatan | 30.000 | 4 kegiatan | 30.000 | 4 kegiatan | 30.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 13 | Fasilitasi bansos/hibah keagamaan. | Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah keagamaan. | - | - | 0 | 6 dokumen | 35.000 | 6 dokumen | 50.000 | - | 0 | 6 dokumen | 50.000 | 6 dokumen | 50.000 | 6 dokumen | 50.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 14 | Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan. | Jumlah kegiatan rakor program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 2 kegiatan | 50.000 | 2 kegiatan | 80.000 | 2 kegiatan | 70.000 | 3 kegiatan | 100.000 | 3 kegiatan | 100.000 | 3 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 15 | Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan. | Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 1 kegiatan | 10.000 | 2 kegiatan | 25.000 | 2 kegiatan | 30.000 | 3 kegiatan | 50.000 | 3 kegiatan | 50.000 | 3 kegiatan | 50.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 16 | Penyusunan database lembaga sosial kemasyarakatan. | Jumlah dokumen database lembaga sosial kemasyarakatan yang disusun. | - | - | 0 | 1 dokumen | 35.000 | 1 dokumen | 50.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 17 | Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan. | Jumlah kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 2 kegiatan | 50.000 | 2 kegiatan | 70.000 | - | 0 | 2 kegiatan | 80.000 | 2 kegiatan | 80.000 | 2 kegiatan | 80.000 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 18 | Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan. | Jumlah kegiatan fasilitasi operasional lembaga/ organisasi sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 10 kegiatan | 60.000 | 10 kegiatan | 60.000 | 15 kegiatan | 100.000 | 15 kegiatan | 100.000 | 15 kegiatan | 100.000 | 15 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | | |
|--|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|--|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | | 4 | 08 | 23 | 19 | Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan. | Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 6 dokumen | 35.000 | 6 dokumen | 50.000 | - | 0 | 6 dokumen | 50.000 | 6 dokumen | 50.000 | Bag. Kesra | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 20 | Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan. | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah pada lembaga sosial kemasyarakatan. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 30.000 | 4 kegiatan | 30.000 | - | 0 | 4 kegiatan | 30.000 | 4 kegiatan | 30.000 | Bag. Kesra | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 21 | Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. | Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. | - | - | 0 | 2 kegiatan | 50.000 | 2 kegiatan | 75.000 | 1 kegiatan | 70.000 | 3 kegiatan | 100.000 | 3 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 22 | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK. | Jumlah kegiatan pemantauan kemajuan sikap mental ODMK. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 80.000 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan pelaksanaan rakor ODMK | | | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 1 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 24 | Pembinaan eks psikotik. | Jumlah kegiatan pembinaan/penyuluhan eks psikotik dan keluarganya (family gathering).. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 50.000 | 4 kegiatan | 80.000 | 4 kegiatan | 70.000 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 25 | Penyusunan, penataan dan evaluasi database kemiskinan. | Jumlah dokumen penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun. | - | - | 0 | 1 dokumen | 1.090 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | Bag. Kesra |
| | | | 4 | 08 | 23 | 26 | Monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. | Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. | - | - | 0 | 4 kegiatan | 50.000 | 4 kegiatan | 75.000 | 4 kegiatan | 75.000 | 4 kegiatan | 100.000 | 4 kegiatan | 100.000 | Bag. Kesra | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan rakor penanggulangan kemiskinan. | | | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | |
| | | | 4 | 08 | 23 | 27 | Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. | Jumlah kegiatan rakor dinas dan fasilitasi pada tim penanggulangan kemiskinan setda. | - | - | 0 | 2 kegiatan | 125.000 | 2 kegiatan | 250.000 | 1 kegiatan | 150.000 | 2 kegiatan | 225.000 | 2 kegiatan | 225.000 | Bag. Kesra | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. | | | | 4 kegiatan | | 4 kegiatan | | 2 kegiatan | | 4 kegiatan | | 4 kegiatan | | 4 kegiatan | | |
| 6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah | | | | | | | Persentase kegiatan /paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi | 3,00 % | 2,00 % | 761.309 | 2,20 % | 421.590 | 2,40 % | 500.000 | 2,60 % | 415.000 | 2,80 % | 600.000 | 3,00 % | 650.000 | Bag. Pemb. | | |
| | | | 1 | 03 | 32 | | Program pengaturan jasa konstruksi. | Prosentase Terwujudnya pengaturan jasa konstruksi dengan baik. | 100 % | 100 % | 24.400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|---|----|----|----|---|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 1 | 03 | 32 | 01 | Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. | Jumlah peserta sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. | 75 orang | 75 orang | 24.400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 1 | 03 | 33 | | Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. | Prosentase Meningkatnya upaya pemberdayaan jasa konstruksi. | 100 % | 100 % | 96.255 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 1 | 03 | 33 | 01 | Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha). | Jumlah SIM konstruksi yang disusun | 1 SIM | 1 SIM | 96.255 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 1 | 03 | 34 | | Program Pengawasan Jasa Konstruksi. | Prosentase Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi secara efektif. | 100 % | 100 % | 245.850 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 1 | 03 | 34 | 01 | Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. | Jumlah buku data kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di PD, Movev pengawasan pekerjaan konstruksi. | 2 buku | 2 buku | 245.850 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Adpem |
| | | | 4 | 08 | 17 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. | 100 % | 100 % | 394.804 | 100 % | 421.590 | 100 % | 500.000 | 100 % | 415.000 | 100 % | 600.000 | 100 % | 650.000 | Bag. Pembangunan |
| | | | 4 | 08 | 17 | 06 | Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. | Jumlah fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP. Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Pokja dan Sekretariat ULP | 100% 25 orang | 100 kali 25 orang | 394.804 25 orang | 100 kali 25 orang | 421.590 25 orang | 100 kali 25 orang | 500.000 25 orang | 100 kali 25 orang | 415.000 25 orang | 100 kali 25 orang | 600.000 25 orang | 100 kali 25 orang | 650.000 25 orang | Bag. Pembangunan |
| | | | 7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah | | | | | Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda | 65 % | 70 % | 3.354.607 | 75 % | 3.947.062 | 80 % | 3.710.150 | 85 % | 4.268.845 | 90 % | 4.368.845 | 90 % | 4.368.845 | Bag. Hukum Bag. Tapem Bag. Perekonomian Bag. Org. |
| | | | 4 | 08 | 20 | | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. | 100 % | 100 % | 343.949 | 100 % | 1.020.200 | 100 % | 685.525 | 100 % | 810.000 | 100 % | 910.000 | 100 % | 910.000 | Bag. Hukum Bag. Tapem Bag. Perekonomian |
| | | | 4 | 08 | 20 | 02 | Pembentukan unit bantuan hukum. | Jumlah Perkara dan bantuan hukum Bagi masyarakat miskin yang tertangani. | 6 perkara | 6 perkara | 171.449 | 6 perkara | 225.000 | 6 perkara | 300.000 | 6 perkara | 385.000 | 6 perkara | 385.000 | 6 perkara | 385.000 | Bag. Hukum |
| | | | 1 | 20 | 24 | 05 | Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan. | Jumlah kegiatan rakor kecamatan, desa dan kelurahan. | 4 Kali | 4 Kali | 172.500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|---|--|--|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 20 | 06 | Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. | Jumlah pengaduan masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani. | - | - | 0 | 14 permasalahan | 595.200 | 14 permasalahan | 185.525 | 14 permasalahan | 225.000 | 14 permasalahan | 225.000 | 14 permasalahan | 225.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 20 | 08 | Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam. | Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. | - | - | 0 | 12 kali | 100.000 | 12 kali | 100.000 | 12 kali | 100.000 | 12 kali | 150.000 | 12 kali | 150.000 | Bag. Perekonomian |
| | | | 4 | 08 | 20 | 10 | Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan. | Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. | - | - | 0 | 12 kali. | 100.000 | 12 kali. | 100.000 | 12 kali. | 100.000 | 12 kali. | 150.000 | 12 kali. | 150.000 | Bag. Perekonomian |
| | | | 4 | 08 | 22 | | Program penataan peraturan perundang-undangan. | Persentase tertatanya peraturan perundang – undangan. | 100 % | 100 % | 3.010.658 | 100 % | 2.926.862 | 100 % | 3.024.625 | 100 % | 3.458.845 | 100 % | 3.458.845 | 100 % | 3.458.845 | Bagian Hukum, Bagian Organisasi. |
| | | | 4 | 08 | 22 | 02 | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan. | Jumlah propemperda yang disusun. | 1 surat | 1 surat | 52.500 | 1 surat | 50.000 | 1 surat | 69.475 | 1 surat | 105.000 | 1 surat | 105.000 | 1 surat | 105.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 22 | 03 | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. | Jumlah praperda menjadi raperda dan menjadi perda. | 20 perda | 20 perda | 396.665 | 20 perda | 462.500 | 20 perda | 475.000 | 20 perda | 525.000 | 20 perda | 525.000 | 20 perda | 525.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 22 | 04 | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. | Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah. | 28 sosialisasi | 28 sosialisasi | 389.147 | 28 sosialisasi | 330.000 | 28 sosialisasi | 320.000 | 28 sosialisasi | 375.000 | 28 sosialisasi | 375.000 | 28 sosialisasi | 375.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 22 | 05 | Publikasi peraturan perundang-undangan. | Jumlah buku produk hukum yang dicetak dan dipublikasikan serta peserta uplooting data publikasi JDIH | 600 buku | 600 buku | 434.120 | 600 buku | 519.207 | 350 buku | 490.525 | 9.000 buku | 525.000 | 9.000 buku | 525.000 | 9.000 buku | 525.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 22 | 07 | Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun. | 1 peraturan | 1 peraturan | 773.400 | - | 0 | 2 peraturan | 479.100 | 2 peraturan | 513.845 | 2 peraturan | 513.845 | 2 peraturan | 513.845 | Bag. Organisasi |
| | | | 4 | 08 | 22 | 10 | Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK). | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK). | - | - | 0 | 2 peraturan | 665.300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Organisasi |
| | | | 1 | 20 | 26 | 12 | Fasilitasi Penyusunan Regulasi di Tingkat Desa/ Kelurahan | Jumlah Perda dan Perbup yang tersusun dan mengatur mengenai Desa/Kelurahan. | 4 perda | 4 perda | 400.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Tapem |
| | | | 4 | 08 | 22 | 14 | Penyuluhan peraturan perundang-undangan. | Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa. | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 66.106 | 6 kegiatan | 202.000 | 6 kegiatan | 235.000 | 6 kegiatan | 275.000 | 6 kegiatan | 275.000 | 6 kegiatan | 275.000 | Bag. Hukum |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | | | |
|----|--------|---------|---|----|----|----|---|---|--|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | |
| | | | 4 | 08 | 22 | 16 | Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah. | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun. | - | - | 0 | 2 peraturan | 104.000 | 2 peraturan | 150.000 | 2 peraturan | 200.000 | 2 peraturan | 200.000 | 2 peraturan | 200.000 | Bag. Organisasi | | |
| | | | 4 | 08 | 22 | 18 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. | Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi. | 50 Produk Hukum Daerah | 50 Produk Hukum Daerah | 170.420 | 50 Produk Hukum Daerah | 149.100 | 50 Produk Hukum Daerah | 250.000 | 762 Produk Hukum Daerah | 290.000 | 762 Produk Hukum Daerah | 290.000 | 762 Produk Hukum Daerah | 290.000 | Bag. Hukum | | |
| | | | 4 | 08 | 22 | 19 | Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum. | Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yang dibentuk, kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kabupaten Pemalang. | 14 kelompok | 14 kelompok | 138.158 | 14 kelompok | 214.950 | 14 kelompok | 245.000 | 14 kelompok | 260.000 | 14 kelompok | 260.000 | 14 kelompok | 260.000 | Bag. Hukum | | |
| | | | 4 | 08 | 22 | 20 | Fasilitasi Pemenuhan HAM. | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun. | 75 peserta | 75 peserta | 72.377 | 75 peserta | 64.340 | 75 peserta | 130.525 | 75 peserta | 175.000 | 75 peserta | 175.000 | 75 peserta | 175.000 | 75 peserta | 175.000 | Bag. Hukum |
| | | | 4 | 08 | 22 | 27 | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Desa. | Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi. | 700 produk hokum | 700 produk hokum | 117.765 | 700 produk hokum | 165.465 | 600 produk hokum | 180.000 | 600 produk hokum | 215.000 | 600 produk hokum | 215.000 | 600 produk hokum | 215.000 | 600 produk hokum | 215.000 | Bag. Hukum |
| | | | 8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik | | | | Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah) | 8 | 3 | 1.444.795 | 4 | 1.445.933 | 5 | 1.642.005 | 6 | 1.716.728 | 7 | 2.185.000 | 8 | 2.200.000 | 8 | 2.200.000 | Bag. Perekonomian Bag. Pemb. Bag. Umum | |
| | | | 1 | 03 | 26 | | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. | Prosentase Terwujudnya pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. | 100 % | 100 % | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 03 | 26 | 05 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. | Jumlah pelaksanaan rakor movev dan pelaporan dalam pengelolaan SDA dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan. | 18 kali | 18 kali | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 16 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Prosentase Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. | 100 % | 100 % | 362.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | | |
|----|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|---|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | | 1 | 16 | 15 | 05 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. | Jumlah pelaksanaan rakor di bidang penanaman modal dan rakor pameran di bidang penanaman modal Pemantauan PMA/PMDN. | 4 kali | 4 kali | 52.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. | |
| | | | 1 | 16 | 15 | 08 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. | Jumlah pembinaan dan evaluasi PD BPR dan BKK tingkat provinsi, pembinaan 3 Perusda di Kabupaten Pemalang dan rakor perusda. | 12 kali | 12 kali | 310.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. | |
| | | | 4 | 08 | 16 | | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah. | 100 % | 100 % | 194.062 | 100 % | 1.245.933 | 100 % | 1.642.005 | 100 % | 1.516.728 | 100 % | 1.935.000 | 100 % | 1.950.000 | Bag. Pemb. Bag. Umum Bag. Perekonomian | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 01 | Penyusunan analisa standar belanja. | Jumlah dokumen analisa standar belanja yang tersusun. | - | - | 0 | 1 dokumen | 236.500 | 1 dokumen | 271.000 | 1 dokumen | 219.000 | 1 dokumen | 300.000 | 1 dokumen | 315.000 | Bag. Pembangunan | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 04 | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. | Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun. | 1 perbup | 1 perbup | 27.086 | 1 perbup | 50.000 | - | 0 | 1 perbup | 70.000 | 1 perbup | 75.000 | 1 perbup | 75.000 | Bag. Pembangunan | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan. | 100 % | 100 % | 120.301 | - | 0 | 100 % | 271.205 | 100 % | 346.078 | 100 % | 350.000 | 100 % | 350.000 | Bag. Umum | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah. | Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset. | 100 % | 100 % | 46.675 | 100 % | 53.663 | 100 % | 82.400 | 100 % | 56.650 | 100 % | 60.000 | 100 % | 60.000 | Bag. Umum | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 35 | Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. | Jumlah pegawai yang mengikuti workshop. | - | - | 0 | 100 % | 169.270 | 100 % | 82.400 | 100 % | 125.000 | 100 % | 125.000 | 100 % | 125.000 | Bag. Umum | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 37 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD. | Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD. Jumlah Penyusunan Raperda BUMD dan Analisis Investasi | - | - | 0 | 12 kali | 340.000 | 12 kali | 340.000 | 28 kali | 342.500 | 28 kali | 350.000 | 28 kali | 350.000 | 2 buku 2 buku 2 buku | Bag. Perekonomian |
| | | | 4 | 08 | 16 | 38 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. | - | - | 0 | 8 kali | 25.000 | 5 kali | 25.000 | 12 kali | 25.000 | 12 kali | 50.000 | 12 kali | 50.000 | Bag. Perekonomian | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 39 | Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT. | Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT. | - | - | 0 | 6 kali | 146.500 | 6 kali | 145.000 | 6 kali | 57.500 | 6 kali | 300.000 | 6 kali | 300.000 | Bag. Perekonomian | |
| | | | 4 | 08 | 16 | 40 | Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian. | Jumlah kormonevlap operasi dan UKM. | - | - | 0 | 12 kali | 75.000 | 12 kali | 275.000 | 12 kali | 175.000 | 12 kali | 175.000 | 12 kali | 175.000 | Bag. Perekonomian | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | Kode Rekening Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Tahun terakhir Renstra 2021 | | Lokasi | |
|--------------------|--------|---------|--------------------------------|----|----|----|--|---|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target |
| | | | 4 | 08 | 16 | 41 | Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis. | Jumlah pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi bidang PPTR. | - | - | 0 | 6 kali | 150.000 | 6 kali | 150.000 | 6 kali | 100.000 | 6 kali | 150.000 | 6 kali | 150.000 | Bag. Perekonomian |
| | | | 1 | 21 | 15 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). | Prosentase Meningkatnya ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). | 100 % | 100 % | 513.733 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 21 | 15 | 29 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian. | Jumlah pelaksanaan kormonevlap KP3 Kab. Pematang, Bintek Administrasi Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kab. Pematang, kormonevlap EKUINDA, kormonevlap Pengendalian Inflasi daerah dan Study Komparatif PPTR. | 6 kali | 6 kali | 513.733 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 4 | 08 | 28 | | Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah. | Persentase pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah | 100 % | 100 % | 200.000 | 100% | 200.000 | - | 0 | 100% | 200.000 | 100% | 250.000 | 100% | 250.000 | Bag. Perekonomian |
| | | | 1 | 21 | 16 | 01 | Koordinasi Pemantauan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. | Jumlah pelaksanaan kormonevlap Bidang Ekuinda. | 24 kali | 24 kali | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 21 | 16 | 02 | Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah (PPID). | Jumlah pelaksanaan kormonevlap pengendalian inflasi daerah. | 20 kali | 20 kali | 100.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 4 | 08 | 28 | 03 | Koordinasi Ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah. | Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA Jumlah Rakor TPID, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah. | - | - | 0 | 12 kali | 200.000 | - | 0 | 12 kali | 200.000 | 12 kali | 250.000 | 12 kali | 250.000 | Bag. Perekonomian |
| | | | 1 | 22 | 16 | | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. | Persentase berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan. | 100 % | 100 % | 75.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| | | | 1 | 22 | 16 | 06 | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. | Jumlah rakor lembaga keuangan mikro berbadan hukum 3 kali, lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum agar menjadi LKM berbadan hukum 6 kali, Study kom peratif Bidang LKM 1 kali. | 9 kali | 9 kali | 75.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Bag. Perekonomian dan SDA. |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | 27.926.306 | | 27.351.219 | | 27.357.563 | | 27.096.746 | | 31.774.135 | | 32.857.395 | | |

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci program-program yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang mengacu pada sasaran, terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2

**Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021**

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|--|---------|--|----------|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. | 1. | Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. | 1. | Forum komunikasi pendayagunaan aparatur daerah. |
| | | | | 2. | Fasilitasi kerjasama antar daerah. |
| | | | | 3. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah. |
| | | | | 4. | Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama daerah. |
| | | | | 5. | Penggalian / kajian potensi kerjasama daerah. |
| | | | | 6. | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan. |
| | | | | 7. | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. |
| | | | | 8. | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah. |
| | | | | 9. | Fasilitasi / pembentukan kerjasama daerah. |
| | | 2. | Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. | 1. | Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan. |
| | | | | 2. | Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). |
| | | | | 3. | Penyusunan buku data monografi kecamatan. |
| | | | | 4. | Sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan. |
| | | | | 5. | Penyusunan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. |
| | | 6. | Rapat koordinasi forum kecamatan. | | |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---------|---|--|
| | | 3. Program pengembangan data/informasi. | <p>1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.</p> <p>2. Penyusunan buku data monografi kecamatan.</p> <p>3. Sistem informasi manajemen pemerintahan desa (SIMPEMDES).</p> |
| | | 4. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. | <p>1. Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang pertanahan.</p> <p>2. Rapat koordinasi di bidang pertanahan.</p> |
| | | 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | 1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan. |
| | | 6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. | 1. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. |
| | | 7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. | <p>1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.</p> <p>2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.</p> <p>3. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.</p> <p>4. Kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.</p> <p>6. Penyelenggaraan protokoler kepala daerah.</p> <p>7. Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.</p> <p>8. Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum.</p> |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|--|---------|---|----------|--|
| | | | | 9. | Fasilitasi penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya. |
| | | | | 10. | Fasilitasi pelaksanaan pameran bidang pemerintahan. |
| | | | | 11. | Penyusunan telaahan Bupati oleh Staf Ahli. |
| | | 8. | Program pengembangan wilayah perbatasan. | 1. | Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi. |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. | 9. | Program perencanaan pembangunan daerah. | 1. | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). |
| | | | | 2. | Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. |
| | | 10. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | 1. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN). |
| | | | | 2. | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. |
| | | | | 3. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. |
| | | | | 4. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan. |
| | | | | 5. | Pengendalian Pelaksanaan Hasil - hasil Pembangunan. |
| | | | | 6. | Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. |
| | | | | 7. | Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). |
| | | | | 8. | Penyusunan memori serah terima jabatan Bupati /Wakil Bupati. |
| | | 11. | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD. | 1. | Penyusunan data base perencanaan SKPD. |
| | | | | 2. | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. |
| | | | | 3. | Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten. |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|---|---------|--|----------|---|
| | | 12. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. | 1. | Sosialisasi peraturan perundang - undangan |
| | | | | 2. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan |
| | | | | 3. | Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD. |
| | | | | 4. | Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi. |
| | | 13. | Program pembinaan dan pengembangan aparatur. | 1. | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. |
| | | | | 2. | Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS. |
| | | | | 3. | Fasilitasi urusan kepegawaian. |
| | | | | 4. | Fasilitasi urusan kepegawaian bagi pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah. |
| | | 14. | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. | 1. | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik. | 15. | Program pelayanan administrasi perkantoran. | 1. | Penyediaan jasa surat-menyurat. |
| | | | | 2. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. |
| | | | | 3. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. |
| | | | | 4. | Penyediaan jasa administrasi keuangan. |
| | | | | 5. | Penyediaan jasa kebersihan kantor. |
| | | | | 6. | Penyediaan alat tulis kantor. |
| | | | | 7. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. |
| | | | | 8. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. |
| | | | | 9. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---------|---|---|
| | | | <p>10. Penyediaan peralatan rumah tangga.</p> <p>11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Penyediaan bahan logistik kantor.</p> <p>13. Penyediaan makanan dan minuman.</p> <p>14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah.</p> <p>15. Penyediaan jasa keamanan.</p> <p>16. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS.</p> |
| | | <p>16. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</p> | <p>1. Pembangunan gedung kantor.</p> <p>2. Pengadaan mobil jabatan</p> <p>3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.</p> <p>4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas.</p> <p>5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.</p> <p>6. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.</p> <p>7. Pengadaan peralatan gedung kantor.</p> <p>8. Pengadaan mebelair.</p> <p>9. Pengadaan komputer dan perlengkapannya.</p> <p>10. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan.</p> <p>11. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas.</p> <p>12. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.</p> <p>13. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.</p> <p>14. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional.</p> <p>15. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas.</p> |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---------|---|--|
| | | | <p>16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.</p> <p>17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas.</p> <p>18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.</p> <p>19. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.</p> |
| | | 17. Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. | <p>1. Pembinaan dan monitoring reformasi birokrasi.</p> <p>2. Penyusunan sistem dan prosedur kerja.</p> <p>3. Penerapan sistem e-Government.</p> <p>4. Penyusunan sistem dan prosedur kerja di SKPD.</p> |
| | | 18. Program pelayanan publik. | <p>1. Standar pelayanan minimal.</p> <p>2. Pembinaan lembaga pelayanan publik.</p> <p>3. Fasilitasi sirvei kepuasan masyarakat.</p> <p>4. Fasilitasi inovasi pelayanan publik.</p> |
| | | 19. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. | <p>1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.</p> <p>2. Pengadaan alat studio dan komunikasi.</p> <p>3. Pemeliharaan alat studio dan komunikasi.</p> <p>4. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.</p> |
| | | 20. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. | <p>1. Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking.</p> <p>2. Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang.</p> |
| | | 21. Program kerjasama informasi dengan mas media. | <p>1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.</p> |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|--|---------|--|----------|--|
| | | | | 2. | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| | | 22. | Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah. | 1. | Revitalisasi pendayagunaan media center daerah. |
| | | 23. | Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika. | 1. | Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD. |
| | | | | 2. | Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial). |
| | | | | 3. | Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi. |
| | | | | 4. | Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah. |
| | | | | 5. | Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat. |
| 4. | Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. | 24. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. | 1. | Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. |
| | | | | 2. | Fasilitasi pelayanan layanan tata naskah secara elektronik. |
| | | 25. | Program peningkatan disiplin aparatur. | 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. |
| 2. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu. | | | | |
| 3. | Fasilitasi kelengkapan pakaian dinas. | | | | |
| 5. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama. | 26. | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. | 1. | Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. |
| | | 27. | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | 1. | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan. |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---------|--|---|
| | | | <p>2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.</p> |
| | | 28. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. | <p>1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.</p> <p>2. Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan.</p> <p>3. Fasilitasi operasional komisi penanggulangan AIDS.</p> |
| | | 29. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. | <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.</p> <p>2. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> |
| | | 30. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | <p>1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.</p> <p>2. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.</p> <p>3. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.</p> |
| | | 31. Program Pembinaan dan Pemasarakatan olah raga. | <p>1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.</p> <p>2. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.</p> |
| | | 32. Program pengembangan wawasan kebangsaan. | <p>1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.</p> |

| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
|----|---------|---|--|
| | | 33. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. | 1. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. 2. Fasilitasi petugas pendamping haji daerah dan jama'ah haji dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. |
| | | 34. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. | 1. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. 2. Peningkatan forum komunikasi ulama dan umaro. 3. Fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan. 4. Fasilitasi kegiatan keagamaan. 5. Fasilitasi petugas haji daerah dan forum silaturahmi bersama Forkompinda. 6. Fasilitasi kegiatan ibadah haji. 7. Penyusunan database lembaga keagamaan formal dan non formal. 8. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan. 9. Monitoring dan evaluasi program-program keagamaan. 10. Fasilitasi bansos/hibah keagamaan. 11. Koordinasi kebijakan dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan. 12. Sosialisasi kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan. 13. Penyusunan database lembaga sosial kemasyarakatan. 14. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan. 15. Fasilitasi penguatan lembaga sosial kemasyarakatan. |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|---|---------|---|----------|---|
| | | | | 16. | Fasilitasi bansos/hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan. |
| | | | | 17. | Monitoring dan evaluasi pemberian bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan. |
| | | | | 18. | Koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. |
| | | | | 19. | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental ODMK. |
| | | | | 20. | Pembinaan eks psikotik. |
| | | | | 21. | Penyusunan, penataan dan evaluasi database kemiskinan. |
| | | | | 22. | Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. |
| | | | | 23. | Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. |
| 6. | Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah. | 35. | Program pengaturan jasa konstruksi. | 1. | Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. |
| | | 36. | Program pemberdayaan jasa konstruksi. | 1. | Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha). |
| | | 37. | Program pengawasan jasa konstruksi. | 1. | Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. |
| | | 38. | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. | 1. | Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintahan. |
| 7. | Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah | 39. | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | 1. | Pembentukan unit bantuan hukum. |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|---------|---------|--|----------|---|
| | | | | 2. | Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan. |
| | | | | 3. | Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. |
| | | | | 4. | Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam. |
| | | | | 5. | Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan. |
| | | 40. | Program penataan peraturan perundang-undangan. | 1. | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan. |
| | | | | 2. | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. |
| | | | | 3. | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. |
| | | | | 4. | Publikasi peraturan perundang-undangan. |
| | | | | 5. | Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah |
| | | | | 6. | Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan pemerintah daerah (EVALUASI SOTK). |
| | | | | 7. | Fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat desa/ kelurahan |
| | | | | 8. | Penyuluhan peraturan perundang-undangan. |
| | | | | 9. | Penyusunan kelengkapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah daerah. |
| | | | | 10. | Sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah. |
| | | | | 11. | Fasilitasi keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum. |
| | | | | 12. | Fasilitasi pemenuhan HAM. |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|---|---------|--|----------|---|
| | | | | 13. | Kajian peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dan evaluasi rancangan peraturan desa, klarifikasi produk hukum desa terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan desa. |
| 8. | Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik. | 41. | Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. | 1. | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. |
| | | 42. | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. | 1. | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. |
| | | | | 2. | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. |
| | | 43. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. | 1. | Penyusunan analisa standar belanja. |
| | | | | 2. | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. |
| | | | | 3. | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. |
| | | | | 4. | Peningkatan manajemen aset/barang daerah. |
| | | | | 5. | Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. |
| | | | | 6. | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan BUMD. |
| 7. | Peningkatan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. | | | | |
| 8. | Evaluasi pelaksanaan peningkatan pemantauan DBHCHT. | | | | |
| 9. | Kormonevlap sarana dan prasarana perekonomian. | | | | |

| No | Sasaran | Program | | Kegiatan | |
|----|---------|---------|--|----------|--|
| | | | | 10. | Koordinasi dan pembinaan KP3 dan pengembangan aktivitas agribisnis. |
| | | 44. | Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). | 1. | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian. |
| | | 45. | Program pengendalian harga dan inflasi daerah. | 1. | Koordinasi pemantauan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. |
| | | | | 2. | Koordinasi pemantauan pengendalian inflasi daerah (PPID). |
| | | | | 3. | Koordinasi ekuinda, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah. |
| | | 46. | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. | 1. | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. |

5.3 Indikator Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang secara rinci sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

TABEL 5.3
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG BERDASARKAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PEMALANG 2016 – 2021

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. | Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citrapublik. | Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas Aparatur dlm meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. | Tujuan 1 : Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang–undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif. | | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | Na | Na | Na | 56,35 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | |
| | | | | | | Nilai LPPD yang diperoleh. | Nilai | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | Jumlah Mou kerjasama antar daerah. | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | 1. | Jumlah peserta FGD terkait pendayagunaan aparatur daerah. | Peserta | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 2. | Jumlah data laporan kerjasama daerah yang tersusun. | Data | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | | | |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 3. | Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah. | Kali | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 4. | Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah | Raperbup/ Raperda | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 5. | Jumlah laporan hasil kajian tentang potensi kerja sama daerah yang disusun. | Laporan | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 6. | Jumlah koordinasi kerjasama wilayah perbatasan yang dilakukan. | Kali | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7. | Jumlah koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah yang dilakukan. | Kali | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 8. | Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengenai kerjasama daerah. | Kali | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 9. | Jumlah draft dokumen pembentukan kerjasama daerah. | Dokumen | - | - | - | 30 | 10 | 40 | 50 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|---|-----------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | Persentase peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah kecamatan se Kabupaten Pemalang yang dibina. | Kecamatan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | | 2. Jumlah laporan per triwulan tentang monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan se Kabupaten Pemalang. | Laporan | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| | | | | | 3. Jumlah Laporan Buku Monografi Kecamatan se Kabupaten Pemalang tiap semester. | Laporan | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | 4. Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang mengatur tentang kecamatan | Kegiatan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | | 5. Jumlah regulasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang tersusun | Peraturan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | | 6. Jumlah rakor forum kecamatan yang terselenggara | Kegiatan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|---------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase perkembangan data/informasi. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi upload data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Website Portal Pengadaan. | Kali | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah buku data monografi kecamatan dan pengadaan papan data monografi. | Buku | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. Jumlah buku data aparatur pemerintah desa dan buku profil BPD. | Buku | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Penyelesaian TMKH untuk fasilitasi Pemerintah kecamatan & pemukiman Warga, 1 BA Kesepakatan/ Rekomendasi teknis untuk pelaksanaan TMKH, Ijin Prinsip, BATM, Tatabatas, Pelepasan hak. | Dokumen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 2. | Jumlah fasilitasi rakor permasalahan dibidang pertanahan dan Bintek Administrasi Pertanahan Desa / Kelurahan. | Bulan | 12 | 12- | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah pembinaan kelurahan bintek administrasi kelurahan. | Kali | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan monev LPPDesa, Bintek Pelaksanaan evaluasi LPPDesa dan Penghargaan Camat pembina terbaik. | Kecamatan | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase pemenuhan terhadap pelayanan kedinasan KDH/WKDH. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Persentase terlaksananya dialog/audiensi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 2. | Rata - rata penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen / luar negeri. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 3. | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah. | Kali | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | 4. | Persentase kecamatan yang mendapat kunjungan kerja/ inspeksi KDH/ WKDH | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 5. | Persentase pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 6. | Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan protokoler. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 7. | Jumlah materi rakor dan naskah sambutan KDH/WKDH/ Sekda. | Naskah | 220 | 220 | 200 | 250 | 280 | 300 | 330 | 330 |
| | | | | | 8. | Jumlah permasalahan bidang pemerintahan umum yang dikoordinasikan | Bulan | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 9. | Jumlah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pematang Jaya yang terfasilitasi | Kegiatan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | | 10. | Jumlah pelaksanaan pameran bidang pemerintahan | Kegiatan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | | | | 11. | Persentase telaahan Bupati oleh Staf Ahli yang tersusun dalam 1 tahun. | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | Persentase ketersediaan informasi rupa bumi dari masing-masing wilayah perbatasan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Jumlah pilar batas daerah yang mendapat pemeliharaan. | Pilar | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | Sasaran 2 : | | Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh. | Nilai | (50) C | (50) C | (55) CC | (60) CC | (62) B | (63) B | (64) B |
| | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. | | Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen laporan kinerja yang diperoleh. | Nilai | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | Prosentase Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pematang Jaya. | Buku | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah buku data laporan capaian kinerja PD Triwulan I, II, III dan IV. | Buku | 4 | 4 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|---|---------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | Presentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda yang disusun. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 2. Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 3. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Setda. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 4. Jumlah buku data laporan capaian kinerja PD Triwulan I, II, III dan IV. | Buku | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | 5. Jumlah laporan hasil-hasil pembangunan. | Laporan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 6. Jumlah dokumen LPPD Kab. Pematang Jaya yang tersusun dan publikasi ILPPD. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 7. Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemda yang disusun. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 8. Jumlah dokumen memori serah terima jabatan Bupati/Wakil Bupati yang tersusun. | Dokumen | - | - | - | - | - | - | 1 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|---------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia renstra dan renja. | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 2. Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 3. Jumlah kegiatan fasilitasi data RUP yang di Upload di Website Portal Pengadaan | Kali | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek / pelatihan. | Peserta | - | - | - | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | | 3. Jumlah ASN dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa yang mengikuti Seminar/Workshop. | Orang | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | 4. Jumlah peserta yang mengikutti seminar, workshop. | Peserta | - | - | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|---------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase aparatur yang dibina dalam periode tertentu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah dokumen sistem informasi dan urusan kepegawaian yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial, evaluasi analisis jab. Struktural, evaluasi jab. fungsional umum yang tersusun. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 3. Persentase urusan kepegawaian yang tertangani. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Jumlah dokumen profil kepegawaian setda yang tersusun. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 4. Jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Brg/Jasa yg tersusun angka kreditnya | Orang | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | Persentase Meningkatnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Persentase dokumen /arsip keuangan di lingkungan Setda yg terdata dan tertata. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|--|--|--------|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayan publik. | Skor | 77,00 | 76,00 | 75,31 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | | | | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Persentase pemenuhan jasa surat menyurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 2. Persentase pemenuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 3. Persentase kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 4. Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan dilingkungan setda. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 5. Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 6. Persentase pemenuhan alat tulis kantor di lingkungan Setda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 7. | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 8. | Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 9. | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 10. | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 11. | Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 12. | Jumlah logistik kantor yang disediakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 13. | Persentase penyediaan makanan dan minuman | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 14. | Persentase pelaksanaan rakor dan konsultasi didalam dan keluar daerah. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 15. | Persentase pemenuhan jasa keamanan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 16. | Jumlah jenis layanan jasa kesehatan KDH / WKDH dan keluarga. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | Persentase terpenuhinya sarana dan prsarana perkantoran aparatur. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Jumlah gedung yang dibangun. | % | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 2. | Jumlah Mobil jabatan yang dibeli. | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibeli. | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 4. | Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang dipenuhi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 5. | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 6. | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 7. | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 8. | Jumlah mebelair yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 9. | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 10. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 11. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 12. | Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 13. | Persentase pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 14. | Persentase pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 15. | Persentase perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 16. | Persentase perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 17. | Persentase peralatan rumah jabatan/dinas yang dilakukan pemeliharaannya secara rutin/ berkala. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|---|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 18. | Persentase peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin/berkala. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 19. | Persentase mebelair yang dilakukan pemeliharaannya secara rutin/berkala. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Jumlah regulasi birokrasi yang disusun. | | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 1. | Jumlah kelompok budaya kerja yang terbentuk. | Kelompok | - | - | - | - | 20 | 28 | 27 |
| | | | | | | Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK. | Unit Kerja | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 7 | 10 |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. | Peserta | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | 2. | Jumlah laporan evaluasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP SKPD. | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 3. | Persentase terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan melalui sistem aplikasi | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4. | Jumlah dokumen SOP yang disusun. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|---|----------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki SPP. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah laporan evaluasi SPM yang disusun. | Laporan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 2. Jumlah unit pelayanan publik yg dibina. | Unit | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | 3. Jumlah unit pelayanan publik yang difasilitasi survei kepuasan masyarakat | Unit | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 4. Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan. | Kegiatan | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang difasilitasi penyusunannya. | Proposal | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Persentase berkembangnya komunikasi, informasi dan media masa | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Persentase terpeliharanya jaringan komunikasi dan persandian. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah pengadaan peralatan studio, komunikasi dan dokumentasi yg tersedia. | Unit | 31 | 31 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 3. | Jumlah alat studio dan komunikasi yang mendapat pemeliharaan. | Unit | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4. | Tersedianya jaringan dan alat komunikasi serta persandian (aiphone, telepon, dan PABX) untuk ke lancaran operasional Santel di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pematang Jaya. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Terasilitasi nya peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur pemda dalam bidang public speaking. | Orang | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti orientasi keterbukaan informasi. | Orang | 240 | 240 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Berkembang nya kerjasama informasi dengan mas media | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media massa (cetak dan elektronik). | Kegiatan | 85 | 85 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 2. | Jumlah tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah dan tabloid. | Edisi | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Terwujudnya penguatan kelembagaan pengelolaan komunikasi dan informasi daerah | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Terfasilitasinya informasi yang dibutuhkan media massa untuk kepentingan peliputan dan publikasi. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang di dokumentasikan dalam bentuk foto,video,buku dll. | Kegiatan | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial). | Iklan | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. | Terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi. | Dialog | 52 | 52 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 4. | Jumlah rakor PPID dan PPID Pembantu, dan terfasilitasinya penyelesaian sengketa informasi. | Kali | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 5. | Jumlah kegiatan yang dikelola LPPL Radio swara widuri. | Siaran | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah. | | Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang menggunakan IT dalam pembangunan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Tersedianya layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Kab. Pemalang, Pelatihan bagi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. | Bulan | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Tersedianya layanan TNDE. | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|--|---|--------|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase tingkat kedisiplinan ASN. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah pakaian dinas KDH/ WKDH yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah jenis pakaian KDH/WKDH yang dibeli. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 3. Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas. | Buah | - | - | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | Sasaran 5 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama. | Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Persentase terwujudnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan & perlindungan anak. | Kali | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|------------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase Terwujudnya penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan. | Kegiatan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | Kegiatan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. Jumlah organisasi jaringan pemerdayaan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. | Organisasi | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah pelaksanaan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. | Bulan | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah kegiatan penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular seksual bagi perempuan. | Kegiatan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 3. | Jumlah pelaksanaan fasilitasi operasional komisi penanggulangan AIDS. | Bulan | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. | Bulan | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. | Kali | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. | Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan. | Kali | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 1. | Jumlah orang yang mendapat pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. | Orang | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah orang yang mendapat pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. | Orang | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan. | Orang | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah kegiatan senam aerobik yang dilaksanakan. | Kegiatan | 48 | 48 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. | Jumlah kegiatan senam massal yang dilaksanakan. | Kegiatan | 48 | 48 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Persentase berkembangnya wawasan kebangsaan. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah kegt. Pengajian rutin di lingkungan Setda, KDH/WKDH dan pengajian bersama PKK. | Kegiatan | 30 | 30 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|----------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Prosentase Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | Kegiatan | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah kegiatan fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan Jamaah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. | Kegiatan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades. | Desa | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah kegiatan rakor untuk FKUB dan persiapan tarhim. | Kegiatan | - | - | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | Jumlah kegiatan tarawih silaturahmi forkompinda | Kegiatan | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 3. | Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam. | Kegiatan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | 4. | Jumlah kegiatan pengajian rutin dalam upaya pembinaan pegawai oleh KDH/ WKDH dan pengajian bersama PKK. | Kegiatan | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan, Kabupaten dan pengiriman ke tingkat provinsi/ nasional. | Kegiatan | - | - | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 |
| | | | | | 5. | Jumlah anggota tim pendamping haji daerah dan tim kesehatan haji daerah. | Orang | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelepasan dan silaturahmi jamaah haji dengan forkompinda. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | 6. | Jumlah bus untuk fasilitasi transportasi jamaah haji. | Bus | - | - | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan fasilitasi operasional kegiatan jamaah haji non BPIH. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 7. | Jumlah dokumen database lembaga keagamaan formal dan non formal. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | | | 8. | Jumlah kegt. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi/ lembaga keagamaan. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| | | | | | 9. | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi keagamaan. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| | | | | | 10. | Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah keagamaan. | Dokumen | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| | | | | | 11. | Jumlah kegiatan rakor program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | | 12. | Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan program dan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan. | Kegiatan | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | | | | 13. | Jumlah dokumen database lembaga sosial kemasyarakatan yang disusun. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 14. | Jumlah kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi sosial kemasyarakatan. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| | | | | | 15. | Jumlah kegiatan fasilitasi operasional lembaga/ organisasi sosial kemasyarakatan. | Kegiatan | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | 16. | Jumlah dokumen fasilitasi administrasi pengurusan rekomendasi permintaan bansos/hibah lembaga sosial kemasyarakatan. | Dokumen | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| | | | | | 17. | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bansos/ hibah pada lembaga sosial kemasyarakatan. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| | | | | | 18. | Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | | 19. | Jumlah kegiatan pemantauan kemajuan sikap mental ODMK. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelaksanaan rakor ODMK | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 20. | Jumlah kegiatan pembinaan/penyuluhan eks psikotik dan keluarganya (family gathering).. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | 21. | Jumlah dokumen pe-nataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun. | Dokumen | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 22. | Jumlah kegiatan pe-laksanaan moni-toring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan ra-kor penanggulangan kemiskinan. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 23. | Jumlah kegiatan rakor dinas dan fasilitasi pada tim penanggulangan kemiskinan setda. | Kegiatan | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | Jumlah kegiatan penyuluhan masya-rakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. | Kegiatan | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Sasaran 6 : Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah. | | Persentase kegiatan /paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi. | % | 3,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | Prosentase Terwujudnya pengaturan jasa konstruksi dengan baik. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah peserta sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait. | Orang | 75 | 75 | - | - | - | - | - |
| | | | | | Prosentase Meningkatnya upaya pemberdayaan jasa konstruksi. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah SIM konstruksi yang disusun | SIM | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | | Prosentase Terwujudnya pengawasan jasa konstruksi secara efektif. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah buku data kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan di PD, Monev pengawasan pekerjaan konstruksi. | Buku | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 1. | Jumlah fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP. | Kali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Pokja dan Sekretariat ULP | Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | Sasaran 7 : Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dgn peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | | Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| | | | | | | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Jumlah Perkara dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tertangani. | Perkara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | 2. | Jumlah kegiatan rakor kecamatan, desa dan kelurahan. | Kali | 4 | 4 | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|-------|----------------------------|-------|-------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 3. | Jumlah pengaduan masyarakat dan Legal Opinion yang tertangani. | Permasalahan | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | | 4. | Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam perlindungan pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. | Kali | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | 5. | Jumlah pelaksanaan rakor, monev dan pelaporan dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. | Kali | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | Persentase tertatanya peraturan perundang – undangan. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. | Jumlah propemperda yang disusun. | Surat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 2. | Jumlah praraperda menjadi raperda dan menjadi perda. | Perda | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | 3. | Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah. | Sosialisasi | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | 4. | Jumlah buku produk hukum yg dicetak & dipublikasikan serta peserta uploading data publikasi JDIH. | Buku | 600 | 600 | 600 | 350 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 5. | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun. | Peraturan | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 6. | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (EVALUASI SOTK). | Peraturan | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | 7. | Jumlah Perda dan Perbup yg tersusun dan mengatur mengenai Desa/Kelurahan. | Perda | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 8. | Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang – undangan di desa. | Kegiatan | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | 9. | Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun. | Peraturan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 10. | Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi. | Produk Hukum Daerah | 50 | 50 | 50 | 50 | 762 | 762 | 762 |
| | | | | | 11. | Jumlah peserta lomba kadarkum, kelompok kadarkum yang dibentuk/dibina, desa sadar hukum yg dibentuk , kelompok kadarkum yang mengikuti seleksi dan temu kader PKK se Kab. Pematang Jaya. | Kelompok | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | 12. | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Aksi HAM, Laporan pelaksanaan Aksi HAM yang disusun, Laporan data peduli HAM yang disusun. | Peserta | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | 13. | Jumlah produk hukum daerah yang dikaji dan produk hukum desa yang diklarifikasi. | Produk Hukum | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya per kembangan pere konomian, usaha daerah dan sektor informal yg lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik | | Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah) | Rupiah | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | Prosentase Terwujudnya pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. | Jumlah pelaks. rakor monev dan pelaporan dlm pengelolaan SDA dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan. | Kali | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|---------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Prosentase Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah pelaksanaan rakor di bidang penanaman modal dan rakor pameran di bidang penanaman modal Pemantauan PMA/PMDN. | Kali | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah pembinaan dan evaluasi PD BPR dan BKK tingkat provinsi, pembinaan 3 Perusda di Kabupaten Pemalang dan rakor perusda. | Kali | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase pemenuhan pengelolaan keuangan daerah. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah dokumen analisa standar belanja yg tersusun. | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 2. Jumlah Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun. | Perbup | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 3. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan. | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | 4. | Jumlah buku laporan pengelolaan manajemen aset. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 5. | Jumlah pegawai yang mengikuti workshop. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 6. | Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD. | Kali | - | - | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda BUMD dan Analisis Investasi | Buku | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 7. | Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. | Kali | - | - | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | 8. | Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT. | Kali | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | 9. | Jumlah kormonev koperasi dan UKM. | Kali | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | 10. | Jumlah pelaksanaan Rakor, Monitoring dan Evaluasi bidang PPTR. | Kali | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | Jumlah Kormonevlap Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Kali | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Prosentase Meningkatnya ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah pelaksanaan kormonevlap KP3 Kab. Pml, Bintek Administrasi Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kab. Pml, kormonevlap EKUINDA, Pengendalian Inflasi daerah dan Study Komparatif PPTR. | Kali | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Persentase pelaksanaan Kormonev EKUINDA, Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 1. Jumlah pelaksanaan kormonevlap Bidang Ekuinda. | Kali | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2. Jumlah pelaksanaan kormonevlap pengendalian inflasi daerah. | Kali | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3. Jumlah Pelaksanaan Rakor EKUINDA, Pelaksanaan Kormonevlap EKUINDA | Kali | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | Jumlah Rakor TPID, Pelaksanaan Kormonevlap Pengendalian Inflasi Daerah. | Kali | - | - | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 |

| RPJMD KABUPATEN PEMALANG | | | RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|---|---------|--|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------------------|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA 2021 | |
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | Persentase berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan. | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1. Jumlah rakor lembaga keuangan mikro berbadan hukum 3 kali, lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum agar menjadi LKM berbadan hukum 6 kali, Study kom peratif Bidang LKM 1 kali. | Kali | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Adapun dari indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1. di bawah ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021

| No | Indikator RPJMD | Satuan | Target | | | | | |
|----|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD pelayanan publik | Skor | B | B | B | B | B | B |
| 2 | Nilai LkjIP. | Nilai | C | CC | CC | B | B | B |

BAB VII P E N U T U P

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus terus meningkatkan efektifitas, efisiensi dan inovasi pelaksanaan manajemen pelayanan publik dalam kerangka Visi *Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera*. Visi tersebut menjadi acuan dari gerak dan langkah seluruh komponen dan elemen dilingkungan Sekretariat Daerah. Diperlukan satu pemahaman dari semua unsur guna menciptakan keselarasan dalam mewujudkan visi dimaksud. Kemudian pada setiap akhir tahun juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan kerangka acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berisi program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indikatif, yang telah disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada pada masing – masing Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran/dana yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra Sekretariat Daerah 2016 - 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah 2016 - 2021.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah ini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi perbaikan Renstra ini. Dan kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diimplementasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ttd

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195906011988031007